

**PENGGUNAAN ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI)
PABEAN DALAM PROSES PENGAJUAN PEMBERITAHUAN
BARANG IMPOR (PIB) TERHADAP EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI KERJA PADA
PT. HERU RAHAYU
SURABAYA**



SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Terapan Transportasi Pelayaran**

**Disusun Oleh: ATIKA KHOIRUL UMAROH
NIT.50135048 K**

**PROGRAM STUDI KALKDIPLOMA IV
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGUNAAN *ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI)* PABEAN
DALAM PROSES PENGAJUAN PEMBERITAHUAN BARANG IMPOR
(PIB) TERHADAP EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KERJA PADA PT.
HERU RAHAYU SURABAYA
DISUSUN OLEH :**

**ATIKA KHOIRUL UMAROH
NIT. 50135048 K**

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan di depan Dewan Penguji
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Semarang,

Dosen Pembimbing
Materi

Dosen Pembimbing
Metodologi dan Penelitian

H. SUHARSO, SH, S.Pd, SE, MM
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19540117 197903 1 002

AMAD NARTO, M.Pd, M.Mar.E
Pembina, IV/a
NIP.19641212 199808 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi KALK

Dr. WINARNO, S.ST, M.H
Penata Tingkat I, III/d
NIP.197602082002121003

HALAMAN PENGESAHAN
PENGUNAAN *ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI)* PABEAN
DALAM PROSES PENGAJUAN PEMBERITAHUAN BARANG IMPOR
(PIB) TERHADAP EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KERJA PADA PT.
HERU RAHAYU SURABAYA
DISUSUN OLEH :

ATIKA KHOIRUL UMAROH
NIT. 50135048 K

Telah Diuji dan disyahkan oleh Dewan Penguji serta Dinyatakan Lulus
Dengan nilai pada tanggal

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Ir. FITRI KENSIWI, M.Pd
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19660721 199203 2 001

H. SUHARSO, SH, S.Pd, SE, MM
Penata Tingkat I, III/d
NIP.19540117 197903 1 002

LAKSMI SETYORINI, S.Pd., M.Si
Penata, III/c
NIP.19730111 199803 003

Dikukuhkan oleh :
Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK., M.M
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP.19661110 199803 1 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : ATIKA KHOIRUL UMAROH

NIT : 50135048 K

Jurusan : KALK

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“PENGUNAAN *ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI)* PABEAN DALAM PROSES PENGAJUAN PEMBERITAHUAN BARANG IMPOR (PIB) TERHADAP EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KERJA PADA PT. HERU RAHAYU SURABAYA”** adalah benar hasil karya saya bukan jiplakan skripsi dari orang lain dan saya bertanggung jawab kepada judul maupun isi dari skripsi ini.

Bilamana terbukti merupakan jiplakan dari orang lain maka saya bersedia untuk membuat skripsi dengan judul baru dan atau menerima sanksi lain.

Semarang, 2017

Saya yang menyatakan,

ATIKA KHOIRUL UMAROH
NIT.50135048 K

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim....

“Siapa datang dengan suatu kebaikan, maka dia memperoleh yang lebih baik, Sedang bagi mereka yang datang dengan suatu kejahatan. Maka kejahatan yang paling jelek akan dia dapat”.

(AN. Naml : 90-91)

‘Ilmu dinilai bermanfaat jika disertai amal. Manusia yang paling bodoh ialah yang memberikan dirinya bodoh tanpa mau berusaha meningkatkan ilmunya. Manusia paling pandai mengandalkan ilmunya dan manusia yang bertaqwa adalah yang utama”.

(Sufyan Afs Sfauri)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran **ALLAH S.W.**Tatas berkat rahmat dan hidayahnya serta junjungan **NABI Muhammad S.A.W.**

Segenap penghargaan dan penghormatan dari hati yang terdalam. Karya ini akan penulis persembahkan untuk :

- Sang pemilik jiwaku Allah SWT. Terimakasih atas berjuta nikmat dan karunia-Mu, hingga kumampu berdiri tegak sampai saat ini. Dan berjuta syukurku atas orang-orang yang Engkau kirimkan utukku yang telah menjagaku, menyayangiku dan mengingatkan disaat lalaiku. Dan tetap jagalah dan sayangilah mereka, seperti mereka telah menyayangiku dari pertama kurasakan hangatnya dunia sampai saat ku seperti ini.
- Ayah Suroto dan bunda Waryanti tercinta yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan,serta do'a dan semangat untuk kesuksesan. Saya berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Semoga saya bisa membahagiakan kedua orang tua dan membanggakan kedua orang tua.
- Kedua adikku: Sukma Suamah dan Arfinnindya Rokhima Ma'ruf terima kasih atas segala kasih sayang yang kalian berikan .
- Segenap pimpinan dan staff PT. Heru Rahayu Surabaya.
- Dosen Pembimbing I Bapak H. Suharso, SH, S.Pd, SE, MM dan Dosen Pembimbing II Bapak Amad Narto, M.Pd, M.Mar.E yang telah sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi.
- Segenap Dosen PIP Semarang atas bimbingannya selama ini.
- Taruni 50 yang sudah menemani selama empat tahun.

- Seluruh anggota jurusan KALK 50 dan teman taruna-taruni angkatan 50 terimakasih atas semua kebersamaan, waktu, dorongan, doa dalam setiap keluh kesah, susah senang selama ini.
- Teman-teman grup WA citra #heuheu yang selalu *fast respon*.
- Seluruh senior dan junior semua ini terlalu indah untuk dilupakan, maka kenanglah keindahan ini walau banyak pahitnya, tapi aku yakin aku akan merindukan kalian.
- Seluruh Keluarga Besar Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Terimakasih atas pendidikan dan segala pelajaran yang diberikan selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **Penggunaan *Electronic Data Interchange* (EDI) Pabean Dalam Proses Pengajuan Pemberitahuan Barang Impor (PIB) Terhadap Efetifitas Dan Efisiensi Kerja Pada PT. Heru Rahayu Surabaya**, sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Terapan Transportasi Pelayaran jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laaut dan Kepelabuhan di Diklat Perhubungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

Selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayah dan Ibu terimakasih atas doa dan kasih sayang yang telah kalian berikan.
2. Bapak Marihot Simanjuntak., M.M selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
3. Bapak Dr. Winarno, S.ST, M.H selaku Ketua Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan.
4. Bapak H. Suharso, SH, S.Pd, SE, MM Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah dengan sabar dan bijaksana memberikan bimbingan dan pengarahan.

5. Bapak Amad Narto, M.Pd, M.Mar.E selaku selaku Dosen Pembimbing Metode Penulisan Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan.
6. Seluruh Staf dan jajaran Perwira Resimen, Instruktur, Pembina, semua Dosen, dan Staf Pengajar serta Staf Akademik yang telah memberi bekal ilmu dan pengetahuan.
7. Seluruh pimpinan dan karyawan PT. Heru Rahayu yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
9. Semua teman-teman Angkatan L
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan kemampuan dan sempitnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, segala saran serta kritik yang bersifat membangun akan selalu penulis harapkan demi perbaikan kekurangan tersebut.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAKSI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Definisi Operasional.....	18
C. Kerangka Pikir Penelitian.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	22
B. Waktu dan lokasipenelitian.....	23
C. Data yang diperlukan	23
D. Metode Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisa Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum obyek yang diteliti	35
B. Analisa Masalah	42
C. Pembahasan Masalah.....	47

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pengiriman Data PIB dan Respon Melalui EDI

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 3.1 Pohon Masalah

Gambar 3.2 Pohon Alternatif

Gambar 3.3 Matriks Rincian Kerja

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi KPBC

Gambar 4.2 Stuktur Organisasi PT. Heru Rahayu Surabaya

Gambar 4.3 Tatalasana Impor Melalui Sistem PDE

Gambar 4.4 Tatalasana Impor Melalui Sistem Manual

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pemilihan Masalah Pokok Priotitas

Tabel 3.2	PemilihanMasalahSpesifikPrioritas
Tabel 4.1	Perbandingan biaya operasional pengajuan PIB sistem EDI dan sistem manual
Tabel 4.3	Perbandingan Indikator dari Sistem EDI dan Sistem Manual

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil wawancara
------------	-----------------

Lampiran 2 5 set dokumen-dokumen yang terkena reject

ABSTRAKSI

Atika Khoirul Umaraoh, NIT. 50135048.K, (2017), *“Penggunaan Electronic Data Interchange (EDI) Pabean Dalam Proses Pengajuan Pemberitahuan*

Barang Impor (PIB) Terhadap Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Pada PT. Heru Rahayu Surabaya”, Skripsi Program Diploma IV, Program Studi KALK di , Politek Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: H. Suharso, SH, S.pd, SE, MM, Pembimbing II: Amad Narto, M.Pd, M.Mar.E

Perkembangan ekspor impor yang signifikan, membuat pemerintah memanfaatkan menerapkan teknologi dalam sistem kepabeanan. Kebijakan menerapkan sistem Electronic Data Interchange (EDI) yang merupakan suatu sistem berbasis elektronik sarana pelayanan dokumen dan data kepabeanan yang terintegrasi dan cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan EDI, kendala, dan upaya yang ditempuh PT. Heru Rahayu Surabaya menunjang efektifitas dan efisiensi kerja.

Metodologi penelitian memilih jenis deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumen. Lokasi yang dipilih adalah kantor PT. Heru Rahayu Surabaya dan juga kantor KPBC Tanjung Perak, adapun lama penelitian adalah tiga bulan terhitung sejak tanggal, 27 Juli 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015. Metode pemaparan menggunakan *Urgency, Seriousness, Growth* (USG).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem EDI mempermudah proses *customs clearance* pengajuan PIB, mengurangi *human errors* dan mengurangi penggunaan kertas dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam kualitas dan kuantitas produk jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dan keuntungan perusahaan. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah dalam mempermudah proses pemberitahuan pabean dan mempermudah pengawasan dan pelayanan di kantor bea dan cukai. Pada akhir skripsi penulis memberikan rekomendasi kepada dua obyek. Untuk PT. Heru Rahayu Surabaya disarankan untuk meningkatkan kembali kualitas SDM dan fasilitas pendukung sistem EDI. Kepada KPBC Tanjung Perak untuk lebih mengembangkan sistem EDI dan perlu diterapkan Kepada instansi terkait seperti karantina dan BPOM untuk mendukung program pemerintah lainnya.

Kata kunci: Pengurusan impor-ekspor, sistem EDI, kepabeanan.

ABSTRACT

Atika Khoirul Umaraoh, NIT. 50135048.K, (2017), “*Penggunaan Electronic Data Interchange (EDI) Pabean Dalam Proses Pengajuan Pemberitahuan*

Barang Impor (PIB) Terhadap Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Pada PT. Heru Rahayu Surabaya’, Minithesis, Diploma IV Programme, Port and Shipping Departement in Semarang Merchant Marine Polytecnic, Counselor I: H. Suharso, SH, S.pd, SE, MM, Counselor II: Amad Narto, M.Pd, M.Mar.E

Significant development of export import, make the government applying thecnology in customs system. Wisdom to apply Electronic Data Intrechange (EDI) system is a system which based on electronic document service and customs file that integrated and quickly. Abstacles, and effort that doing by PT. Heru Rahayu Surabaya to support effectivity and work efficiency.

Observation methodology choose descriptive and quairtative submitting data technic using interview, observation, literature study, and document study. Choosen location in PT. Heru Rahayu Surabaya office and also KPBC Tanjung Perak Office, this observation spend time for three monts since 27th July 2015 till 27th October 2015. Description method using Urgenvy, Seriousness, Groowth (USG).

Observation result showed that EDI system easier the process of customs clearance furtherance PIB, lessen human errors and lessen using paper that can increase company aility in quality and quantity service product wich finnaly can increase effectivity and work efficiency and company’s benefit. This also an effort from gofernment to make easy customs notification and easier to control and service in customs and exice office. At the end ofminithesys author give recommendation to two object. For PT. Heru Rahayu Surabaya advice to improve SDM quality and supporting facility EDI system. To KPBC Tanjung Perak more develop EDI system and need to apply in relate government’s programme.

Keywords: Import Export Business, EDI system, Customs.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri ekspor-impor saat ini telah mengalami kemajuan secara signifikan. Perkembangan serta pertumbuhan tersebut harus diikuti dengan fungsi pengawasan dan pelayanan secara maksimal oleh instansi terkait. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (selanjutnya disebut DJBC) merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memegang peran penting dalam perkembangan perekonomian dan industri ekspor-impor di Indonesia.

DJBC bertanggung jawab dalam bidang kepabeanan dan aktivitas pendukung lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepabeanan, DJBC mempunyai tiga fungsi yaitu *revenue collector*, *tradefacilitator*, *community protector*, DJBC harus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. Selain itu untuk melaksanakan fungsi pemungutan pajak dalam rangka impor (berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan) dalam bentuk pemungutan bea masuk atas barang impor, bea keluar atas barang ekspor dan pengawasan lalu lintas barang di wilayah pabean Republik Indonesia, administrasi pabean harus melaksanakan pemeriksaan pabean seakurat mungkin. Disisi lain untuk memperlancar arus barang, intervensi administrasi pabean dalam melakukan pemeriksaan barang harus dilakukan seminimal mungkin. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengenai kewajiban pemberitahuan pabean yang berisi informasi tentang semua barang niaga yang diangkut dengan sarana pengangkut, baik barang impor, barang

ekspor, maupun barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean (Pasal 7A ayat 3).

Kewajiban dalam Pemberitahuan Impor Barang (selanjutnya disebut PIB) ke pihak pabean atau Bea dan Cukai dikenal dengan nama *customs clearance*. Sebelumnya proses pengajuan PIB dilakukan secara manual, yaitu masih menggunakan kertas dan dokumen-dokumen serta melalui birokrasi yang panjang sehingga memerlukan banyak waktu dalam pelayanan oleh pihak Bea dan Cukai, dan juga dengan semakin berkembangnya industri dalam negeri dimana jumlah perusahaan yang melakukan impor semakin bertambah, hal ini mengakibatkan waktu yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian *customs clearance* di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (selanjutnya disebut KPBC) semakin lama dan sering terjadi penumpukan dokumen serta arus barang di pelabuhan yang tidak lancar akibat sistem pelayanan dan birokrasi yang tidak efektif dan efisien.

Oleh karena itu, administrasi pabean memerlukan suatu sarana yang dapat memenuhi kebutuhan untuk mempercepat pelayanan, penyederhanaan proses pelayanan dan pemberian fasilitas serta penerapan sistem pelayanan dokumen yang terintegrasi dan cepat sehingga akan memperlancar arus barang dan dokumen namun juga harus melakukan fungsi pengawasan secara baik. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem kepabeanan.

Pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan kepabeanan yang telah dijalankan adalah pelayanan jasa dokumen ekspor impor, yaitu jasa Pemberitahuan Ekspor Barang (selanjutnya disebut PEB) dan PIB dengan sistem *Electronic Data Interchange* (selanjutnya disebut EDI).pelaksanaan sistem EDI secara mandatori di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya baru berjalan pada tahun 2005, dengan sistem EDI, administrasi pabean dapat memproses pemberitahuan pabean dalam sistem komputer pengguna jasa kepabeanan antara lain perusahaan pelayaran, importir, eksportir, dan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepaabeenan (selanjutnya disebutPPJK), dan ditransmit secara elektronik. Sehingga data yang sama akan segera masuk ke sistem komputer Direktorat Jendral Bea dan Cukai tanpa melalui proses *re-entry*, dimana dalam proses *re-entry* tersebut mungkin dapat terjadi *human errors* seperti kesalahan pengetikan data, selain itu juga menambah waktu pengerjaan.

Penggunaan teknologi EDIPabean di PT. Heru Rahayu Surabaya sangat berpengaruh pada keseluruhan kegiatan,PT. Heru Rahayu Surabaya sebagai PPJK sudah menggunakan,tetapi masih terdapat beberapa staff kurang siap dalam penggunaan dan pengoperasionalan sistem EDIsehingga terjadi beberapakali masalah seperti *reject*dokumen,dan blokirdokumen.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan PIB serta proses jalannya dokumen impor melalui sistem EDIPabean di PT. Heru Rahayu Surabaya, oleh karena itu dalam pembuatan skripsi ini penulis memberanikan diri untuk memilih

judul: “**Penggunaan *Electronic Data Interchange (EDI)* Pabean Dalam Proses Pengajuan Pemberitahuan Barang Impor (PIB) Terhadap Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Pada PT. Heru Rahayu Surabaya**”.

B. Perumusan Masalah

Selama penulis melaksanakan praktek darat (prada) di PT. Heru Rahayu. Penulis menemukan adanya permasalahan, yaitu dalam penggunaan sistem EDI sebagai sistem yang digunakan dalam pemenuhan kewajiban pabean dengan penggunaannya di PT. Heru Rahayu Surabaya . Adapun permasalahan yang akan penulis bahas pada rumusan masalah ini sebagai berikut :

1. Mengapa penggunaan EDI Pabean dibutuhkan oleh PT. Heru Rahayu Surabaya?
2. Kendala apa saja yang dialami PT. Heru Rahayu Surabaya dalam penggunaan EDIPabean?
3. Apa yang ditempuh PT. Heru Rahayu Surabaya untuk mengatasi kendala dalam penggunaan EDIPabean untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kerja?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fakta dan rumusan masalah penelitian, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian dengan judul skripsi “Penggunaan *Electronic Data Interchange (EDI)* Pabean Dalam Proses Pengajuan Pemberitahuan Barang Impor (PIB) Terhadap Efektifitas dan Efisiensi Kerja Pada PT. Heru Rahayu Surabaya ” ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sejauh mana penggunaan EDI yang dibutuhkan di PT. Heru Rahayu Surabaya.
2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang terjadi di PT. Heru Rahayu Surabaya.
3. Untuk menganalisis upaya ditempuh PT. Heru Rahayu Surabaya untuk mengatasi kendala dalam penggunaan EDIPabea untuk menunjang efektifitas dan efisiensi kerja.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai sistem dan prosedur yang berlaku dalam pemenuhan kewajiban pabea dalam rangka impor secara umum, dan penerapan sistem EDI pada pengajuan PIB serta sebagai salah satu persyaratan bagi setiap taruna yang akan menyelesaikan program Diploma IV dan untuk menambah ilmu serta wawasan dalam sistem informasi Pertukaran Data Elektronik (PDE).

- b. Bagi Masyarakat

Untuk memberi masukan pemikiran mengenai peran sistem EDI Pabea dalam menunjang kelancaran pengiriman data PIB yang tepat dan akurat.

c. Bagi Lembaga Pendidikan (PIP Semarang)

Skripsi ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sehingga dapat menjadi sumber bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan, terutama adik kelas dari jurusan KALK.

2. Manfaat Secara Praktis

Skripsi ini juga diharapkan berguna sebagai sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di bidang kepabeanaan, khususnya bagi perkembangan dan pengetahuan tentang penggunaan sistem EDI dalam memenuhi kewajiban pabean dalam rangka impor barang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi secara menyeluruh dan agar lebih mudah memahami isi dari skripsi tersebut. Untuk gambaran lebih jelasnya mengenai skripsi ini, maka penulis membagi membagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain sehingga tercapai tujuan penulisan skripsi ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi tentang alasan pemilihan judul dan pentingnya judul skripsi. Perumusan masalah adalah uraian tentang masalah yang diteliti. Tujuan penelitian berisi tujuan

spesifik yang ingin dicapai. Manfaat penelitian berisi uraian tentang manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian. Sistematika penulisan berisi susunan tata hubungan bagian skripsi yang satu dengan yang lain.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini terdiri dari tujuan pustaka, kerangka pikir, penelitian dan definisi operasional. Tinjauan pustaka berisi seperti teori atau pemikiran serta konsep yang melandasi judul penelitian. Definisi operasional adalah definisi praktis atau operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Waktu dan tempat penelitian menerangkan lokasi dan waktu dimana dan kapan penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Teknik analisis data berisi mengenai alat dan cara analisis data yang digunakan dan pemilihan alat dan cara analisis harus konsisten dengan tujuan penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diungkapkan mengenai objek yang diteliti dan analisis hasil penelitian berisi pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir penulisan yang berisi kesimpulan bab. Kesimpulan adalah hasil pemikiran deduktif dari hasil penelitian tersebut. Pemaparan kesimpulan dilakukan secara kronologis, jelas dan singkat, bukan merupakan pengulangan dari bagian pembahasan hasil pada bab IV. Saran merupakan pemikiran peneliti sebagai alternatif terhadap upaya pemecahan masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung pembahasan tentang penggunaan sistem *Electronic Data Interchange* dalam proses pengajuan PIB terhadap efektifitas dan efisiensi kerja pada PT. Heru Rahayu Surabaya, maka perlu diketahui dan dijelaskan beberapa teori-teori penunjang yang penulis ambil dari beberapa sumber pustaka yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini sehingga dapat lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini.

1. Pengertian Kepabeanan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masu atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

2. Pajak Dalam Rangka Impor

Materi yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang penggunaan system EDI dan bagaimana memanfaatkan INSW dalam melakukan pemeritahuan impor barang yang selanjutnya untuk menghitung besaran pajak dalam rangka impor. Oleh karena itu perlu diketahui terlebih dahulu pengertian pajak dalam rangka impor, pajak dalam rangka impor adalah pajak yang dipungut oleh DJBC atas impor barang yang terdiri dari PPN, PPh ps.22, PPnBM.

3. *Harmonized System*(HS Code)

Menurut Dr. Ali Purwito (2015:53-54) “*Harmonized System (HS)* adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan, transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya”.

Saat ini pengklasifikasian barang di Indonesia didasarkan kepada *Harmonized System* dan dituangkan ke dalam suatu daftar tarif yang disebut Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

4. Pengertian Indonesia *National Single Window (INSW)*

Single Window berasal dari bahasa Inggris, dimana *Single Window* terdiri dari dua suku kata, yaitu *Single* yang berarti satu ataupun tunggal, dan *Window* berarti jendela. Jadi, *Single Window* secara umum dapat diartikan sebagai penyamaan atau mempersamakan suatu sistem pengoperasian.

Menurut Indriani (2015:144) *Indonesia National Single Window* (selanjutnya disebut INSW) adalah sebuah sistem yang melakukan integrasi informasi yang berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang yang menjamin keamanan data dan informasi.

INSW dibentuk dengan Peraturan Presiden No 10 Tahun 2008 dan merupakan sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukan suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*). Pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dilakukan melalui sistem INSW, akan lebih efisien dan efektif. Pembuatan keputusan yang dilakukan oleh instansi terkait, dan dilakukan secara tunggal. Demikian juga untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran

barang (*single decision making for customs clearance and release of cargoes*).

Portal INSW diakses melalui halaman utama (*homepage*) situs resmi INSW dengan mana domain www.insw.go.id. Halaman utama (*homepage*) situs resmi INSW berisi data dan informasi. Portal mempunyai dua fungsi, yaitu informasi (menyediaan semua informasi umum yang dapat diakses oleh masyarakat) dan fungsi operasional (menyediakan informasi khusus dan layanan transaksi). Portal INSW hanya dapat diakses oleh pengguna portal INSW yang ditetapkan oleh Pengelola Portal INSW. Penerima akses merupakan para pihak yang melakukan akses dengan Portal INSW dan meliputi instansi penerbit perizinan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, instansi/lembaga lainnya. Dari pihak swasta, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, serta pelaku usaha lainnya. Kepada penerima hak akses berupa *User-ID*, *Password*, dan kode identifikasi lainnya yang ditetapkan oleh Pengelola Portal INSW.

5. Pengertian *Electronic Data Interchange* (EDI)

Sistem EDI merupakan serangkaian proses transfer data yang terstruktur, dalam format standar yang disetujui, dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya. Sistem EDI menjadi suatu nilai yang penting dalam pengurusan data kepabeanan atau ekspor-impor, karena adanya manfaat kemudahan dan efisiensi waktu.

Menurut Dr. D.A. Lasse (2012:34) Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau

dihimpun,diolah, dan dikirimkan dengan menggunakan perangkat komputer sebagai alat pemroses dan transfer data elektronik.

Menurut Modul pengisian PIB (2016:25) EDI adalah Pertukaran informasi bisnis antar aplikasi-antar perusahaan secara elektronik menggunakan standar yang disepakati bersama.

Menurut Capt. R. P. Suyono (2007:449) EDI adalah pertukaran dokumen dan data melalui komputer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah saling kenal dan percaya dalam perdagangannya.

Turban (2005:404) menyimpulkan EDI adalah standar komunikasi yang memungkinkan transfer data secara elektronik sebagai dokumen rutin, seperti pemesanan pembelian, antara mitra bisnis. EDI akan memformat dokumen sesuai dengan berbagai standar yang telah disepakati sebelumnya. EDI Pabean adalah pertukaran langsung dokumen-dokumen berbasis dari komputer ke komputer, seperti order penjualan, program aplikasi ini dengan fungsi utamanya adalah untuk perekaman dan pencetakan data, antara lain: Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), *Manifest*, Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB), SSPCP.

Menurut Eddy Abdurrahman (1995: 4-6) dokumen PIB dan respon dari Bea Cukai yang dipertukarkan melalui jaringan EDI adalah dokumen dalam bentuk format *United Nation Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transport* (UN/EDIFACT) yaitu:

- a. CURSEP (*Customs Convoyance Report Massage*), merupakan dokumen elektronik mengenai rencana kedatangan sarana pengangkut yang diajukan oleh Perusahaan Pelayaran kepada Bea dan Cukai.
- b. CUSCAR (*Customs Cargo Report Massage*) adalah dokumen elektronik mengenai cargo yang dimuat dalam sarana penangkut (manifest) yang dilaporkan oleh Perusahaan Pelayaran kepada Bea dan Cukai.

- c. CUSDEC (*Customs Declaration Massage*) adalah doumen elektronik mengenai barang yang akan dilepas dari pengawasan pabean, seperti PIB yang diajukan oleh importir atau kuasanya kepada Bea dan Cukai.
- d. CUSRES (*Customs Respons Massage*) adalah dokumen elektronik yang merupakan tanggapan dari Bea dan Cukai atas diterimanya CUSREP, CUSCAR, dan CUSDEC. Tanggapanini dapat berupa pemberian nomor registrasi, penetapan jalur pemeriksaan atau pemberitahuan pengeluaran barang.
- e. CREADV (*Credit Advice Massage*) adalah dokumen eletronik yang berisi informasi dari bank kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara serta Bea dan Cukai yang menyatakan bahwa pada rekkeningas Negara telah dikreditkan sejumlah uang untu pembayaran bea masuk dan PDRI atas barang yang diimpor oleh importir.
- f. PAYROD(*Payment Order*) adalah dokumen elektronik yang berisi perintah dari pengguna jasa kepabeanan (importer) kepada bank untuk membayar bea masuk dan PDRI ke kas negara.
- g. DEBADV (*Debit Advice*) menupakan dokumen elektronik yang berisi informasi dari bank kepada importer yang menyatakan bahwa rekening importer telah didebet sebesar jumlah uang yang tertera dalam payment order untuk pembayaran bea masuk dan PDRI.

6. Komponen Utama *Electronic Data Interchange (EDI)*

a. Pesan Standar

Pesan standar pada dasarnya berisikan *text* yang memuat informasi dan *rule* sebagai penerjemah dari satu lebih dokumen bisnis. Contoh dari standar adalah *Uniform Communication Standart (UCM)* yang mendefinisikan lebih kurang 15 tipe dokumen elekteonik di antaranta adalah *purchase order*, *promotion announcement*, *price change*, *invoice*.

b. Perangkat Lunak

Perangkat lunak EDI berfungsi sebagai penerjemah dari pesan standar EDI ke dalam internal file format perusahaan penerima. Perangkat lunna EDI harus terintegrasi dengan aplikasi bisnis yang

dipakai. Perusahaan harus mengintegrasikan *software* EDI untuk menghemat waktu dan kesalahan mengetik juga akan menghemat biaya.

c. Komunikasi

Komunikasi dalam EDI tentu sangat berbeda dengan komunikasi yang bersifat konvensional. Hal ini disebabkan komunikasi di EDI dilakukan melalui antar mesin (komputer), sehingga diperlukan infrastruktur komunikasi. Bentuk komunikasi infrastruktur yang mula-mula berkembang adalah transaksi berbentuk *point-to-point*, yakni hubungan langsung dari dua perusahaan.

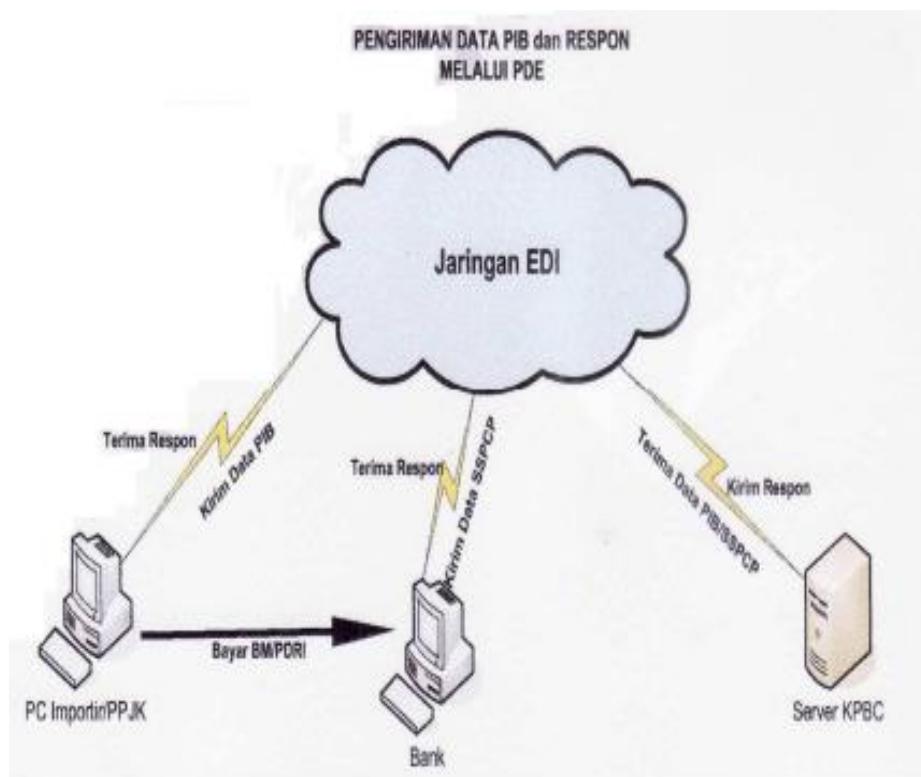
d. Proses *Electronic Data Interchange (EDI)*

Dalam EDI komputer akan berbicara dengan komputer. Berbagai pesan akan dikodekan dengan menggunakan standarnya sebelum ditransmisikan, dengan menggunakan alat pengoversi, kemudian pesan tersebut akan berjalan melalui VAN atau internet. Ketika diterima, pesan tersebut secara otomatis akan diterjemahkan kedalam bahasa bisnis.

7. Alur Pelayanan Impor Direktorat Jendral Bea dan Cukai

Pelayanan impor dimulai dari penyampaian data sampai jalur dan pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Penyimpanan data PIB dapat dikategorikan dalam tiga mekanisme yang disesuaikan dengan masing-masing Kantor Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Penyimpanan PIB melalui mekanisme EDI Mekanisme penyampaian data PIB melalui EDI hanya diberlakukan di Kantor Pelayanan yang telah menerapkan sistem komputerisasi secara PDE.
- b. Penyimpanan PIB melalui mekanisme Media Penyimpanan Data Elektronik lainnya. Maksudnya adalah media yang digunakan untuk menyimpan data elektronik sebagai contohnya *flashdisk*, disket, CD/DVD ROM.
- c. Penyimpanan PIB dengan formulir *hardcopy* atau manual. Penyimpanan data PIB secara EDI dan respon PIB dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. alur Pengiriman Data PIB dan Respon Melalui EDI

Sumber: Modul Pelatihan Penggunaan PIB (2016:8)

8. Pengertian Customs clearance

Menurut Sunarno (2006:4) Penyelesaian dan pengurusan berbagai dokumen administrasi, biaya pajak dan hal terkait lainnya atas suatu barang ekspor ataupun barang impor sampai dengan tahap dikeluarkannya surat persetujuan untuk mengeluarkan barang tersebut.

9. Pengertian Perusahaan Penyedia Jasa Kepabeanan (PPJK)

Menurut Dr. Ali Purwito (2015:19) PPJK atau *customs broker* perusahaan menyediakan jasa di bidang kepabeanan akan mengurus semua kepentingan eksportir maupun importir terkait dengan barang yang dimasukan atau dikeluarkan ke dalam/keluar daerah pabean.

10. Efektifitas dan Efisiensi Kerja

Menurut Sutarto (1978:95) Efektifitas kerja adalah keadaan dimana suatu aktifitas jasmaniah dan rohaniah yang dilakukan oleh manusia dapat mencapai hasil akibat sesuai dengan yang dikehendaki.

Menurut H. Emerson (1990:15) “Efisiensi kerja adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara keuntungan dengan biaya, antara hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang digunakan dalam pelaksanaan, seperti halnya juga maksimum yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan.”

11. Teknologi Informatika

Menurut R. Kelly Rainer, JR (2009:49) Teknologi Informatika (TI) secara umum adalah kumpulan sumber data informasi perusahaan, para pengguna serta manajemen yang menjalankannya. Dengan kata lain teknologi informasi meliputi infrastruktur TI serta semua sistem informasi lainnya di perusahaan.

Beberapa istilah dalam teknologi informatika :

- a. Perangkat Keras (*hardware*) adalah serangkaian peralatan seperti prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Bersama-sama berbagai peralatan tersebut menerima data serta informasi, memprosesnya dan menampilkannya.
- b. Perangkat Lunak (*software*) adalah sekumpulan program yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data.

- c. Basis Data (*database*) adalah sekumpulan arsip (*file*), table, relasi, dan lain-lainnya yang saling beraitan dan menyimpan data serta berbagai hubungan di antaranya.
- d. Jaringan (*network*) adalah sistem koneksi yang memungkinkan dengan berbagai sumber daya antara berbagai komputer yang berbeda.
- e. Prosedur adalah serangkaian instrukksi mengenai bagaimana menghubungkan berbagai kkomponen di atas agar dapat memproses informasi dan menciptakan hasil yang diinginkan.
- f. Orang adalah berbagai individu yang bekerja dengan sistem informasi, berinteraksi dengannya, atau menggunakan hasilnya.
- g. Alat eluaran (*output device*) adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dan olahan data yang dapat berupa tulisan, gambar, atau suara.

Menurut Kamus Oxford (1995) Teknologi Informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar.

12. Biaya Operasional

Biaya operasional secara harfiah terdiri dari 2kata yaitu “biaya” dan “operasional” menurut kamus besar bahasa Indonesia, biaya berarti uang yang harus dikeluarkan untu mengadakan (mendirikan, melakukan, dan lain sebagainya) sesuatu; ongos; belanja; pengeluaran. Sedangkan operasional berarti secara (bersifat) operasi; berhubungan dengan operasi.

Menurut Jopie Yusuf (2006: 33) biaya operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan sehari-hari.

13. Dasar Hukum EDI

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2015.
- c. Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PER-20/BC/2016.

B. Definisi Operasional

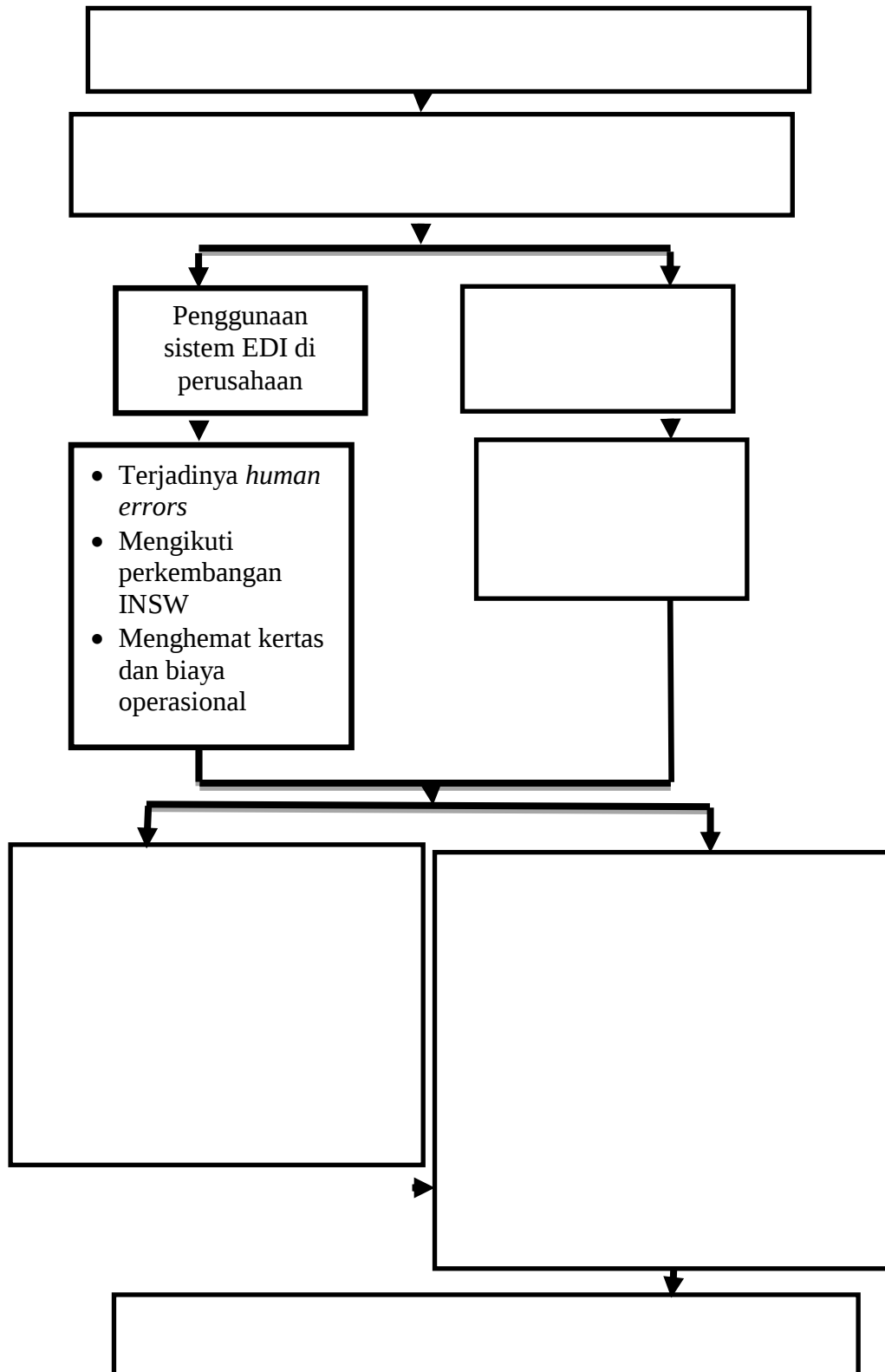
1. *Customs Clearance* adalah suatu proses administrasi pengiriman dan pemeriksaan dokumen, perhitungan biaya-biaya pajak, kepabeanan dan administrasi pemerintah.
2. FOB (*Free On Board*) adalah sistem pembelian barang dimana semua biaya pengiriman dibayarkan setelah kapal sampai di pelabuhan tujuan.
3. CIF (*Cost, Insurance, dan Freight*) adalah sistem pembelian barang dimana biaya pengiriman barang, harga barang dan asuransi dibayarkan sebelum kapal berangkat.
4. C&F (*Cost And Freight*) adalah sistem pembelian yang mencakup biaya barang dan biaya pengiriman.
5. API adalah kependekan dari Angka Pengenal Impor
6. SRP (Surat Registrasi Pabean) adalah surat yang berguna untuk importir sebagai identitas persyaratan dari Bea dan Cukai untuk melakukan impor.

7. *Shipper* adalah nama lain dari eksporter atau pengirim barang. Istilah shipper ini akan selalu dipakai sebagai pengganti kata eksporter atau pengirim barang.
8. *Consignee* adalah nama lain dari importir atau penerima barang. Istilah ini akan selalu dipakkai sebagai pengganti kata importir atau penerima barang.
9. *Notify Party* adalah nama pihak ketiga selain *Consignee* yang mengetahui adanya sebuah pengiriman barang.
10. *Vessel* adalah kapal.
11. *Voyage / Voy* adalah nomor sarana pengangkut/ pengapalan.
12. *Description Of Goods* adalah didkripsi tentang barang.
13. *Gross Weight/ G.W.* adalah berat kotor barang
14. *Net Weight/ N.W.* adalah berat bersih barang
15. UTPK adalah Unit Penumpukan Peti Kemas
16. DEPO adalah tempat penumpukan container kosong
17. *Stuffing/ Loading* adalah proses pemuatan barang kedalam container atau truk angkut.
18. *Unstuffing/ Unloading* adalah proses pembongkaran barang dari container atau truk angkut
19. *Open Stack* adalah waktu dibukanya container/ barang boleh ditempatkan di UPTK atau *warehousing*.
20. *Closing Time* adalah waktu ditutupnya pemasukan/ penumpukan barang di UPTK atau *warehousing*.

21. ETA (*Estimated Time of Arrival*) adalah waktu perkiraan kedatangan kapal atau pesawat.
22. ETD (*Estimated Time of Departure*) adalah perkiraan kedatangan kapal atau pesawat.
23. BTKI adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
24. LCL (*Less Than Container Loaded*) adalah sistem pengiriman barang tanpa menggunakan container atau dengan kata lain pengiriman barang yang kapasitasnya kurang dari standart container.
25. FCL (*Full Container Loaded*) adalah pengiriman barang dengan menggunakan container.
26. *Part Of Shipment* adalah pengiriman dengan menggunakan 1 container tetapi terdiri dari beberapa nama *shipper* tetapi dengan satu tujuan.
27. Notul adalah suatu kejadian dimana barang tidak dapat dikeluarkan karena terkena pemutihan, dokumen tidak *valid* atau dipalsukan, perubahan invoice dan terkena tekanan sewa gudang.
28. PIB adalah Pemberitahuan Impor Barang yang pengisian form nya menggunakan sistem *online* EDI
29. BL (*Bill of Lading*) adalah perjanjian atau bukti pengiriman barang melalui laut.
30. *Packing List* adalah daftar sistem pengepakan yang diterbitkan oleh exporter yang berisikan nama dan alamat *shipper*, *consignee*, dan *notify party* serta jumlah barang, jenis barang, berat barang, sarana pengangkut, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar

31. *Commercial Invoice* adalah daftar nilai harga yang tercantum dalam *packing list*. *Commercial Invoice* ini berisikan nilai barang per item dan total nilai barang.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga *survey normative*. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah *normative* bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif. Prespektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

Menurut Moleong, Lexy J. (2006:3) menerangkan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Kerja peneliti, bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat predeksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu

masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara, Alat yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah USG (*urgency, seriousness, growth*). Metode ini efektif dalam menemukan inti permasalahan karena memastikan bahwa suatu kejadian yang tidak diinginkan atau kerugian yang ditimbulkan tidak berasal pada satu titik penyebab permasalahan namun diambildari beberapa kemungkinan yang ada.

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian tentang penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB ketika penulis melaksanakan praktek darat (prada) di PT. Heru Rahayu Surabaya pada bulan Juli 2015 sampai dengan Oktober 2016 kurang lebih selama tiga bulan. PT. Heru Rahayu adalah jenis perusahaan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan. PT. Heru Rahayu Surabaya memberikan pelayanan pengurusan dibidang kepabeanan khususnya untuk barang ekspor dan impor.

C. Data Yang Diperlukan

Pada penelitian ini akan dipaparkan berbagai macam data yang bersifat kualitatif. Data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data yang merupakan informasi yang bersumber dari koresponden baik secara lisan atau wawancara, maupun secara tulisan, serta diperoleh melalui pengamatan langsung dengan objek yang dipelajari. Dari sumber-sumber ini diperoleh data sebagai berikut:

1. Data primer

Menurut Hariwijaya dan Triton(2011: 58) data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh penulis dinamakan data primer. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dengan cara langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait, yang mengetahui tentang permasalahan yang akan penulis angkat. Penulis memperoleh hasil dari wawancara atau berdiskusi tentang penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB di PT. Heru Rahayu Surabaya.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain. Data ini diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian skripsi atau yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang diperlukan sebagai pedoman teoritis dan ketentuan formal dari keadaan nyata dalam observasi. Serta dari informasi lain yang telah disampaikan pada saat pembelajaran di kampus.

D. Metode Pengumpulan Data

Menurut Hariwijaya dan Triton (2011: 60) metode pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data dalam suatu penelitian yang sangat membutuhkan ketelitian, kecermatan serta penyusunan program yang terinci. Pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan nyata. Karena itu lebih baik mempergunakan suatu pengumpulan data lebih dari satu sehingga dapat

saling melengkapi satu sama lain untuk menuju kesempurnaan skripsi.

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Studi kepustakaan

Menurut Sukardi (2003:33) studi kepustakaan adalah menelusuri dan mencari dasar-dasar acuan yang erat kaitanya dengan masalah penelitian yang hendak dilakukan, dasar-dasar tersebut tidak terbatas dari satu sumber saja tetapi dapat di cari dari berbagai sumber yang kemudian disusun dalam bab tersendiri. Sumber data dapat dilakukan dengan meneliti dan mencatat serta mempelajari buku-buku yang ada diatas perusahaan maupun studi pustaka yang berhubungan dengan EDI Pabean yang memiliki kaitan erat dengan tujuan penulisan skripsi yang ditulis, yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB di PT. Heru Rahayu Surabaya.

2. Studi lapangan

- a. Observasi

Observasi memiliki makna lebih dari sekedar teknik pengumpulan data. Dalam konteks ini, observasi difokuskan sebagai upaya mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti. Peneliti melakukan peninjauan secara cermat dan pengamatan langsung di lapangan atau lokasi penelitian, dan dalam proses penelitian ini peneliti melakukan pengamatan meliputi; kondisi perusahaan, proses kerja, interaksi yang terjadi

dalam kegiatan perusahaan, dan tingkah laku karyawan. Ilmuwan pada bidang perilaku (*behavior scientist*) mendefinisikan observasi sebagai pengamatan atas perilaku manusia, atau lingkungan alam, budaya, keyakinan yang memiliki dampak kepada kehidupan manusia. Lebih luas lagi, observasi melibatkan rentang penuh dari kegiatan pemantauan aktivitas dan kondisi perilaku (*behavioral*) ataupun bukan perilaku (*non-behavioral*). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan selama melaksanakan praktek darat di PT. Heru Rahayu Surabaya tentang pengaruh penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB.

b. *Interview* atau wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan jaman dan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya; telepon, *e-mail*, *syype*, *face time*, atau *video call*. Kegiatan wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Komunikasi antara pewawancara dan yang diwawancarai bersifat intensif dan masuk kepada hal-hal yang bersifat detail. Dalam penelitian ini peneliti melakukan *interview*

untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Manajer, Kepala Operasional, Staff Operasional dan Staff di PT. Heru Rahayu.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis, dokumen-dokumen dan gambar tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, dokumen kepabeanan seperti; PIB, SSPCP, SPPB, B/L, asuransi, *invoice*, *packing list*, *manifest*, dokumen karantina dan lain sebagainya. Dokumen pabean yang tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk memperkuat data. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang berupa dokumen-dokumen kepabeanan yang terkernya *reject* yang didapat pada waktu melakukan penelitian di PT. Heru Rahayu Surabaya.

E. Teknik Analisa Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat kualitatif, untuk itu akan dilakukan penilaian prioritas masalah dari yang paling mendesak hingga tidak terlalu mendesak dengan menggunakan teknik analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG). USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat kegawatan, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1–5 atau 1–10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian *urgency, seriousness, dan growth* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Urgency*

Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.

2. *Seriousness*

Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.

3. *Growth*

Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk. Apabila tidak diatasi akan menimbulkan masalah yang baru dalam jangka panjang.

Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik *scoring*. Proses untuk metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut semakin besar. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Urgency atau urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. *Seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan system atau tidak. *Growth* atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Kemudian peneliti memikirkan pemecahan-pemecahan masalah yang terbaik dari masalah yang menjadi prioritas dan juga mencoba mencari solusi sebagai pemecahan masalah dari penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB.

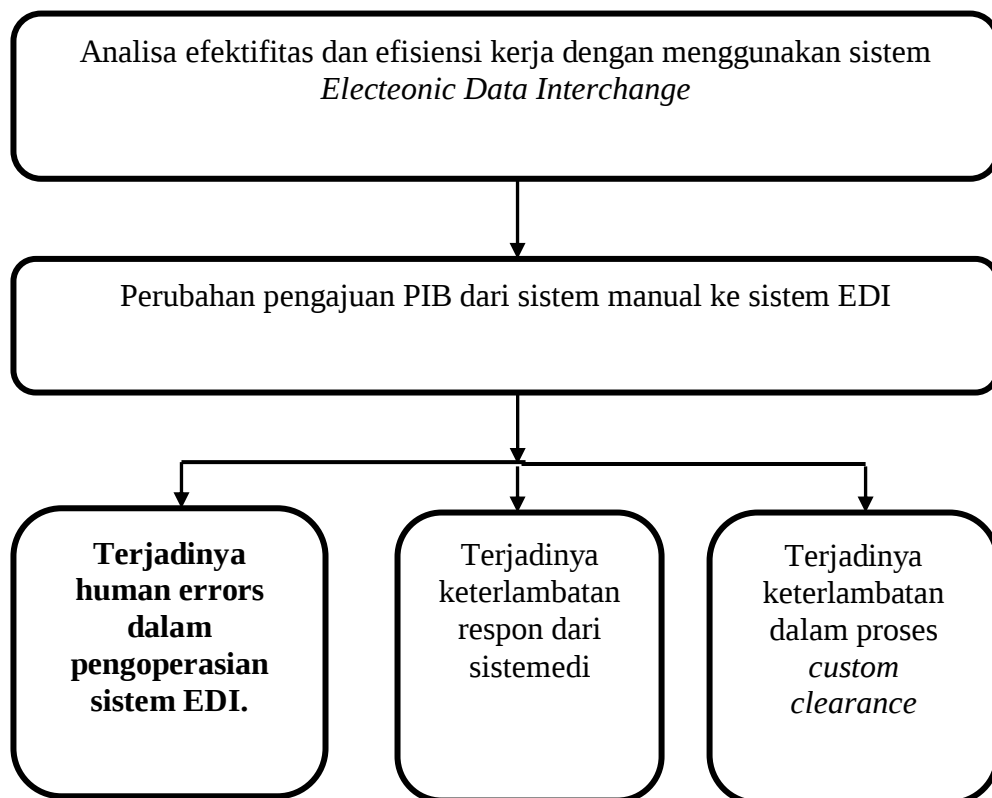
Pembahasan dengan menggunakan matriks USG pada skripsi yang berjudul "Penggunaan *Electronic Data Interchange (EDI)* Pabean Dalam Proses Pengajuan Pemberitahuan Barang Impor (PIB) Terhadap Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Pada PT. Heru Rahayu Surabaya.",

makadapatdijelaskanlangkah-

langkahprioritaspenyelesaianmasalahsebagai berikut:

1. PohonMasalah

Pohon masalah merupakan pendekatan/metode yang digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini dapat diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah.



Gambar 3.1 Pohon Masalah

2. Pemilihan Masalah Pokok Prioritas

Tabel 3.1 Pemilihan Masalah Pokok Prioritas

No	Alternatif Masalah	Nilai Perbandingan		Penilaian / Kriteria				Prioritas
				U	S	G	R	
1.	Terjadinya <i>human errors</i> dalam mengoperasikan sistem <i>Electronic Data Interchange</i> .	1 - 2 1 - 3	1 1	5	5	5	15	I
2.	Terjadinya keterlambatan response dari sistem <i>electronic data interchange</i>	2 - 1 2 - 3	1 2	5	4	4	13	II
3.	Terjadinya keterlambatan dalam proses <i>custom clearance</i>	3 - 1 3 - 2	1 2	2	3	2	8	III

Keterangan :

U : Urgency (kegawatan)	1	: Sangat kecil
S : Seriously (mendesaknya)	2	: Kecil
G : Growth (Pertumbuhan)	3	: Sedang
R : Kesimpulan	4	: Besar
	5	: Sangat besar

Dari matriks diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa, dilihat dari hasil nilai perbandingan, masalah penggunaan sistem EDI yang akan diselesaikan di PT. Heru Rahayu Surabaya diambil dari peringkat satu yaitu masalah yang sering muncul terjadinya *human errors* dalam pengoperasian sistem EDI.

Setelah menentukan prioritas masalah dalam penggunaan system EDI pada PT. Heru Rahayu Surabaya, peneliti kemudian menentukan alternatif

penyelesaian masalah yang tentunya sudah didiskusikan saat wawancara bersama staff PT. Heru Rahayu Surabaya. Adapun alternatif penyelesaian masalah yaitu :

1. Pemilihan Masalah Spesifik Prioritas

Tabel 3.2 Pemilihan Masalah Spesifik Prioritas

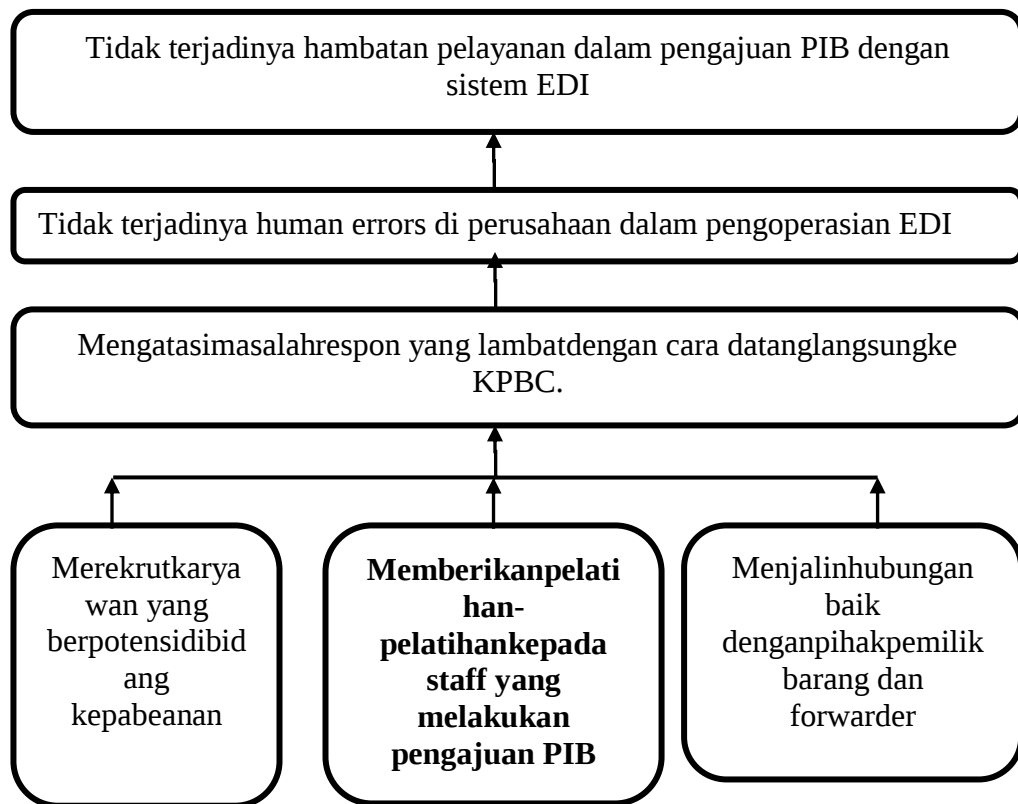
No	Alternatif Masalah	Nilai Perbandingan		Penilaian / Kriteria				Prioritas
				U	S	G	R	
1.	Merekrutkaryawan yang berpotensi dibidang pabean.	1 - 2 1 - 3	2 1	3	4	3	10	II
2.	Memberikan pelatihan-pelatihan kepada staff yang melakukan pengajuan pemberitahuan impor barang	2 - 1 2 - 3	2 2	5	5	4	24	I
3.	Menjalin hubungan baik dengan pihak pemilik barang dan forwarder	3 - 1 3 - 2	1 2	3	3	3	9	III

Matriks diatas menunjukan bahwa alternatif penyelesaian masalah yang paling harus dilakukan adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada staff yang melakukan pengajuan PIB dengan sistem EDI.

1. Pohon Alternatif

Pohon alternatif adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi alternatif-alternatif pemecahan masalah atau tindakan yang dapat diambil untuk mewujudkan sasaran tertentu. Pohon alternatif

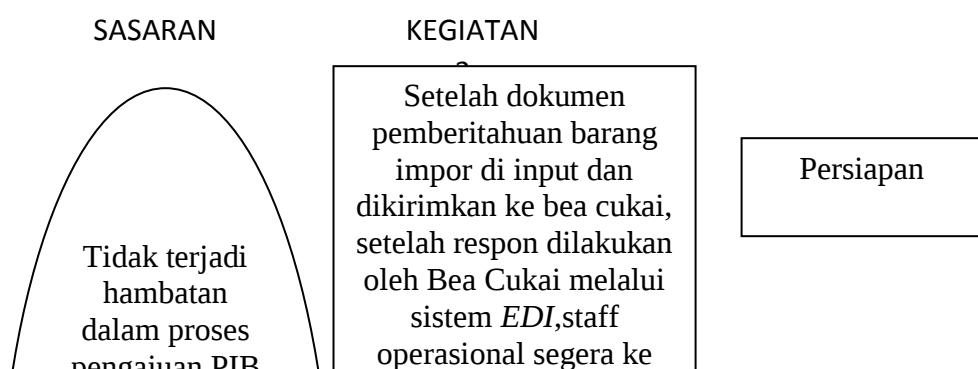
merupakan serangkaian hasil pemilihan dari cabang yang ada pada pohon masalah, cabang yang dipilih dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk memecahkan masalah yang terjadi.

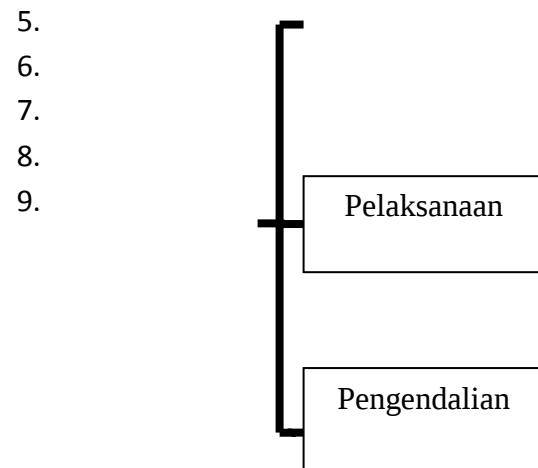


Gambar 3.2 Pohon Alternatif

2. Matriks Rincian Kerja

Matriks rincian kerja merupakan kerangkanya yang menghubungkan sasaran dengan kegiatan dan sumber yang diperlukan. Matriks rincian kerja memberi gambaran yang jelas tentang hal yang akan diperankan setiap orang atau kelompok pada kegiatan mewujudkan sasaran.





Gambar 3.3 Matriks Rincian Kerja

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek yang Diteliti

Dalam skripsi ini, penulis meneliti dua lembaga dengan alasan bahwa permasalahan yang dibahas terjadi di dua lembaga tersebut karena saling berkaitan. Dengan kata lain satu permasalahan yang timbul datangnya dari dua lembaga lain, pemecahan masalah tidak dapat hanya diselesaikan di satu lembaga saja. Adapun dua lembaga tersebut adalah :

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

a. Lokasi Kantor

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya beralamat di Jl. Perak Timur 498 Surabaya yang merupakan ibukota provinsi Jawa Timur dan terletak pada posisi 112°43'22" garis Bujur Timur dan 07°11'54" Lintang Selatan. Tepatnya di Selat Madura sebelah Utara kota Surabaya yang meliputi daerah perairan seluas 1.574,3 ha dan daerah daratan seluas 574,7 ha.

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya memiliki motto untuk melakukan perubahan menuju arah yang baik, konsisten, serta pantang menyerah dalam pelayanan dan pengawasan.

b. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terdepan yang Berintegritas, Berkualitas, dan Inovatif.

2) Misi

Kami memberikan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai secara efisien dan berorientasi pada kepuasan semua pemangku kepentingan.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

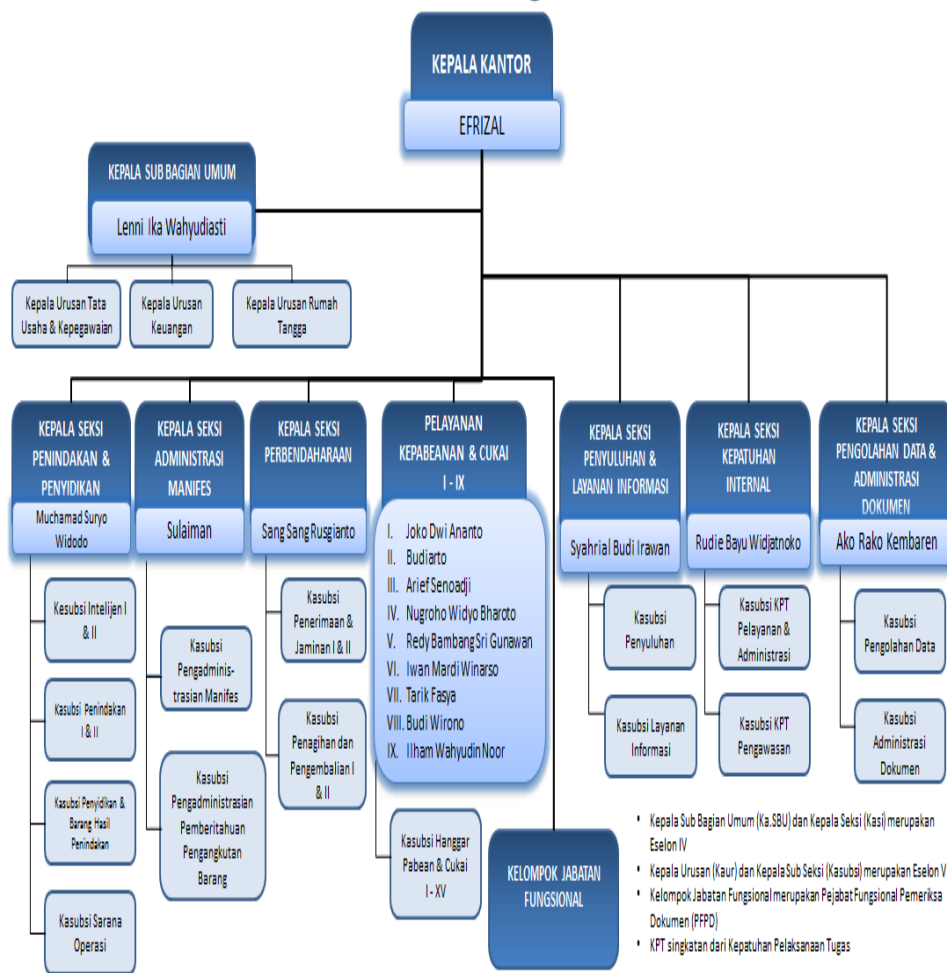
- 1) pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai
- 2) pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai
- 3) pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal
- 4) pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
- 5) penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai

- 6) pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan
kepabeanan dan cukai

d. Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Struktur Organisasi



Gambar 4.1 Stuktur Organisasi KPBC

2. PT. Heru Rahayu Surabaya

a. Riwayat Perusahaan

Pada tahun 1998, Bapak Heri Siswanto memulai usahanya untuk pertama kali yaitu PT. Daisy Permata Samudra yang berkonsentrasi dibidang bongkar muat dengan bekerja sama dengan perusahaan milik korea yang beralamatkan di JL. Laksamana Madya M Nasir, No. 29, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian setelah itu membaangun lagi perusahaan baru, milik sendiri dengan nama PT. Daniel Samudra Abadi.

b. Visi dan Misi

Dalam melayani konsumennya PT. Heru Rahayu memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1) Visi

Menjadi perusahaan pengurusan jasa kkepabeanan yang terpercaya dan dapat diandalkan dengan kkomitmen yang kuat dan pelayanan yang baik.

2) Misi

Menjaga komitmen yang kuat untuk menjalankan dan mengembangkan penyediaan jasa PPJK dan jasa pendukung laainnya dengan baik sehingga mampu memberikan pelayanan yang efektifitas dan efisiensi dan tercapai sesuai keinginan pelanggan.

c. Grup Perusahaan

PT. Daniel Samudra Abadi merupakan sebuah grup perusahaan yang terdiri dari 5 buah perusahaan yaitu:

- 1) PT. Daniel Samudra Abadi sebagai perusahaan bongkat muat
- 2) PT. Hasta Samudra sebagai perusahaan bongkar muat
- 3) PT. Mitra Survindo Inspectama sebagai perusahaan survey kapal
- 4) PT. Heru Rahayu sebagai perusahaan PPJK
- 5) PT. Lestari Sarana Indah sebagai perusahaan trucking

d. Bidang Usaha

PT. Heru Rahayu yang merupakan anggota dari PT. DSA Grup yang memiliki konsentrasi di bidang PPJK dan memberikan pelayanan terhadap barangekspor-impor seperti;

- 1) Pengurusan jasa kepabeanan

Memberikan pelayanan dibidang pengurusan jasa ekspor-impor, kepabeanan, kepelabuhanan serta pelayanan transportasi baik lokal antar pulau maupun internasional.

- 2) Penanganan barang ekspor-impor

Memberikan penanganan dan memberikan pelayanan barang ekspor-impor jenis FCL/LCL (non kontainer maupun kontainer) untuk layanan administrasi pembayaran, pendokumenan hingga sampai pengiriman ke seluruh tujuan di domestik maupun internasional hingga *door to door service*.

- 3) *Warehousing*

Memberikan layanan dan fasilitas pergudangan untuk menyimpan barang selama *stuffing, re-stuffing, pacing, re-pacing*, maupun untuk perlakuan khusus terhadap barang ekspor-impor.

4) *Document service*

Memberikan layanan pengelolaan dokumen bagi pelanggan yang tidak ada waktu dan kesempatan untuk mengurus dokumen seperti; pembuatan dokumen fumigasi karantina, BPOM, SNI dan lain sebagainya.

Sebagai perusahaan PPJK, PT. Heru Rahayu Surabaya harus mempunyai performa yang prima, baik dari segi pelayanan dan kemampuan memberikan jasa, untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam pelayanan dan penggunaan fasilitas untuk penanganan barang ekspor-impor yang belum dimiliki oleh PT. Heru Rahayu bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka memperlancar jalannya *delivery cargo*.

e. Alamat Perusahaan

Setelah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan akhirnya perusahaan yang dulunya beralamat di JL. Laksamana Madya M Nasir, No. 29, Surabaya, Jawa Timur, pada tahun 2012 PT. DSA Grup berpindah lokasi ke kantor baru di JL. Ikan Duyung No. 21, Surabaya, Jawa Timur.

f. Susunan Personalia dan Struktur Organisasi Perusahaan

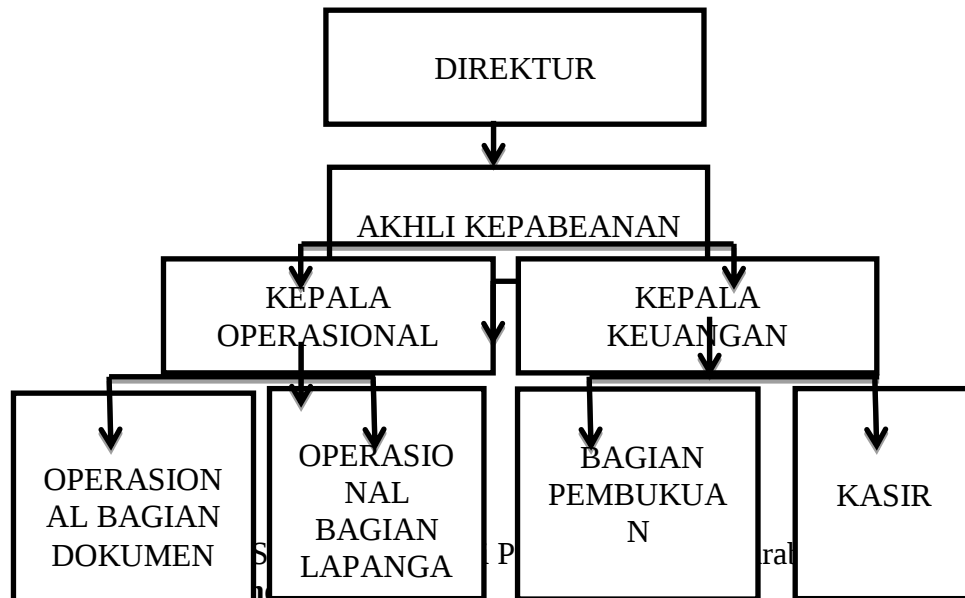
Dalam menjalankan usahanya di bidang kepabeanaan dan pengurusan barang ekspor impor PT. Heru Rahayu Surabaya memiliki susunan personalian sebagai berikut:

- 1) Bapak Heri Siswanto sebagai Direktur Utama PT. Heru Rahayu Surabaya
- 2) Bapak Rasmino sebagai Ahli Kepabeanaan PT. Heru Rahayu Surabaya
- 3) Bapak Dian sebagai Kepala Operasional PT. Heru Rahayu Surabaya
- 4) Bapak Berry Karundeng sebagai Koordinator Operaasional bagian dokumen
- 5) Bapak Jemmy Taroreh sebagai Koordinator Operasional lapangan
- 6) Bapak Cipto sebagai operasional
- 7) Bapak wahyu sebagai operasional
- 8) Ibu Sri sebagai kepala keuangan
- 9) Ibu Niken sebagai keuangan bagian pembukuan
- 10) Ibu Carinna sebagai keuangan bagian kasir

Setiap staff dan karyawan di PT. Heru Rahayu Surabaya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang kemudian harus dijalankan sesuai dengan standar operasional kerja guna mencapai tujuan dari perusahaan.

Adapun susunan organisasi PT. Heru Rahayu Surabaya adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi
PT. Heru Rahayu Surabaya



B.

Analisa masalah yang peneliti gunakan adalah dengan analisa metode deskriptif kualitatif, namun peneliti juga menggunakan metode USG (*Urgency, Seriously, Growth*) untuk mengetahui bagaimana penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB terhadap efektifitas dan efisiensi kerja pada PT. Heru Rahayu Surabaya. Maka selanjutnya penelliti menguraikan masalah sebagai berikut:

1. Alasan Perusahaan Menggunakan Sistem EDI

Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu penulis kemukakan data-data temuan masalah. Dari observasi beberapa hari, penulis mencatat tentang segala sesuatu tentang cara pengoperasian sistem EDI dalam proses pengajuan PIB pada PT. Heru Rahayu Surabaya.

Dalam suatu kesempatan wawancara dengan direktur PT. Heru Rahayu Surabaya, Bapak Heri Siswanto, didapat informasi mengapa perusahaan ini secara bertahap mulai menerapkan sistem EDI yang dimulai sejak tahun 2005. Masih menurut Bapak Heri Siswanto, penerapan sistem baru di perusahaan ini menimbulkan beberapa konsekuensi. Pertama, PT. Heru Rahayu Surabaya ini harus mempunyai komputer dan perangkat IT pendukungnya yang berspesifikasi khusus dan harus membeli lalu menginstal aplikasi EDI. Yang kedua, perusahaan ini harus memberikan fasilitas diklat atau pelatihan-pelatihan khusus tentang kepabeanan dan penggunaan sistem EDI untuk para pegawainya.

Sambil melakukan wawancara, penulis diberitahu tentang bagaimana struktur organisasi perusahaan dan beberapa dokumen-dokumen kepabeanan seperti, *B/L*, *invoice*, *packing list*, *insurance*, *certificate of origin*, dokumen karantina dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu para staff lain di perusahaan tersebut membantu penulis untuk meng-enrty data.

Dengan perubahan penggunaan sistem EDI Pabean dalam proses pengajuan PIB, membuat batas limit pengurusan dokumen kepabeanan juga berubah, dengan sistem EDI hanya butuh waktu kurang lebih 4 jam, sebelumnya butuh waktu 5-7 hari. Sehingga hal ini akan mempercepat kelancaran arus barang dan dokumen.

EDI kepabeanan adalah suatu system pertukaran dokumen elektronik yang dikembangkan oleh DJBC untuk penyampaian dokumen pabean secara elektronik memanfaatkan jaringan EDI. Setiap pengguna jasa EDI akan diberi *mailbox* yang memiliki identifikasi khusus disebut *EDI number* dan *password* yang berfungsi sebagai identitas/alamat pengguna jasa serta menjamin keamanan transaksi dokumen.

Menurut ahli kepabeanan di perusahaan tersebut Bapak Rasmino Moerjandono pada penyerahan pengajuan PIB dari manual menjadi menggunakan sistem EDI mempermudah PT. Heru Rahayu dalam proses pengajuan *customs clearance* barang impor, adapun beberapa manfaat dari sistem EDI Pabean yang digunakan pada PT. Heru Rahayu Surabaya :

- a. Mampu mengikuti perkembangan INSW
- b. Mengurangi penggunaan kertas dan biaya operasional
- c. Mempercepat pelayanan pemberitahuan dan pemrosesan barang
- d. Mengurangi *human errors*
- e. Meninggalkan sistem birokrasi yang rumit
- f. Menambah pengetahuan pengguna jasa dan sistem komputerisasi

2. Kendalayang Ditemukan di Lapangan.

Dalam proses pengoperasian sistem EDI, ternyata tidak sederhana yang dibayangkan. Pengoperasian EDI di PT. Heru Rahayu ternyata tidak dapat dilakukan semua orang. Hanya satu orang

staff saja yang mampu menggunakan sistem EDI dengan baik yaitu Bapak Berry Karundeng, dan masih ada banyak staff lain yang beberapa kali masih harus sering diajari oleh Bapak Berry.

Selama peneliti melaksanakan praktek darat di PT. Heru Rahayu Surabaya, penulis menemukan beberapa masalah lain pada efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sistem EDI. Dimana dalam setiap kali mengirimkan PIB dengan menggunakan sistem EDI selalu terjadi ketidaklancaran yang diakibatkan keterlambatan respon dari pihak Bea Cukai. Seringnya terjadi hal demikian tentu sangatlah mengganggu kelancaran impor barang.

Kondisi tahun 1999, sebelum menggunakan sistem EDI Pabean dalam pengajuan PIB PT. Heru Rahayu Surabaya masih menggunakan sistem manual atau pemberitahuan umum yaitu dengan cara datang langsung ke KPBC dengan menyerahkan dokumen PIB, B/L, *invoice*, *packing list*, *insurance*, dan dokumen pendukung lainnya.

Bapak Berry Karundeng, dimana beliau mengatakan bahwa “penerapan sistem EDI di PT. Heru Rahayu belum dalam kondisi yang optimal”, hal tersebut dapat dilihat dari karyawan yang belum mampu mengoperasikan sistem EDI tersebut dengan baik, sehingga hal ini mengakibatkan kendala-kendala yang menghambat dalam proses pengoperasian sistem EDI, seperti :

- a. Kendala teknis, yaitu yang berhubungan dengan pentransfer data lewat komputer, fasilitas internet, fasilitas telepon dan biaya untuk pengadaan perangkat komputer.
- b. Adanya penambahan dokumen untuk pengajuan PIB
- c. Adanya karyawan yang belum bisa baik dalam mengoperasikan komputer dan sistem EDI

3. Upaya yang ditempuh PT. Heru Rahayu Surabaya

Melihat kendala yang terjadi seperti yang telah penulis uraikan di atas pihak manajemen PT. Heru Rahayu Surabaya merasa resah terhadap komplain dari pelanggan karena keterlambatan dalam proses *customs clearance* yang disebabkan karena seringnya karyawan yang salah dan tidak paham dalam pengajuan PIB dengan sistem EDI dan juga terjadi kerugian dalam perusahaan. Kemudian atas persetujuan dari beberapa pihak PT. Heru Rahayu Surabaya memutuskan untuk melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi masalah yang timbul dalam penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB seperti penambahan tenaga kerja, dan penambahan fasilitas internet.

Menurut kepala operasional Bapak Anugrah Dian , “PT. Heru Rahayu harus memberikan pelatihan kepada staff yang sudah ada tentang sistem EDI dan jika perlu menambah staff yang berkopeten dan handal dibidang kepabeanan dan komputer”.

C. Pembahasan Masalah

Dalam pembahasan alternatif pemecahan masalah ini penulis mencoba untuk memberikan pemecahan masalah yang terjadi dalam penggunaan sistem EDI pada PT. Heru Rahayu Surabaya, bagaimana mengatasi kendala-kendala yang terjadi dan bagaimana mengatasi kendala yang terjadi.

1. Sistem *Electronic Data Interchange (EDI)* Pabean dibutuhkan oleh PT. Heru Rahayu Surabaya

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk memperlancar arus barang dan dokumen DJBC telah menerapkan EDI dalam prosedur kepabeanan. Pada tahap awal penerapan EDI diterapkan dalam bidang impor yang meliputi; prosedur pengangkutan serta pengajuan PIB. Untuk system pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Menuurut *website* PT. EDI Indonesia Pelayanan jasa kepabeanan secara elektronik di Surabaya telah dimulai sejak 15 Mei 1995 dengan dibukanya jasa EDI Surabaya oleh PT. EDI Indonesia sesuai dengan rencana DJBC.

Modernisasi pelayanan kepabeanan dengan perubahan sistem pengajuan PIB yang dulunya menggunakan sistem manual menjadi secara elektronik yaitu dengan sistem EDI adalah agar pertukaran data lebih optimal dimana berdasarkan tuntutan dari berbagai pihak yang menuntut akan kecepatan pengurusan di bidang kepabeanan. Dengan adanya sistem EDI ini, maka memungkinkan para pengguna jasa untuk pengajuan PIB dan dokumen pabean lainnya tanpa mendatangi

KPBC. Hanya perlu dengan sebuah komputer yang dilengkapi dengan internet dan memakai sebuah sistem aplikasi EDI Pabean, maka dengan hal tersebut pihak PPJK sudah dapat melakukan pemberitahuan PIB. Sistem EDI dibutuhkan oleh PT. Heru Rahayu Surabaya, karena :

a. Mengikuti perkembangan INSW

Dengan menggunakan sistem EDI maka secara tidak langsung PT. Heru Rahayu Surabaya dapat menggunakan portal INSW dan mengetahui bagai mana modernisasi sistem kepabeanan.

Karena, INSW merupakan sistem elektronik yang ter-integrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan Internet (*public-network*), yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor-impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor-impor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli kepabeanan Bapak Rasmino Moerjandono di PT. Heru Rahayu tentang INSW dan cara kerja INSW sebagai berikut:

1). Cara kerja portal INSW dalam transaksi impor

- a). Sistem INSW menampung semua database perijinan berdasarkan peraturan dari instansi teknis (GA- *Government Agency*) meliputi larangan dan pembatasan di bidang impor.

- b). Instansi teknis terkait meng-upload perijinan yang diterbitkannya ke Portal INSW.
- c). Portal INSW akan melakukan pengecekan kesesuaian data PIB yang dikirim oleh Importir/PPJK secara elektronik dengan database lartas impor berdasarkan parameter Nomor HS
- d). Dalam hal Nomor HS membutuhkan perijinan, maka Sistem INSW akan mengecek kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait berdasarkan parameter Nomor Aju PIB, NPWP, nomor dan tanggal perijinan, kode ijin dan masa berlaku
- e). Dalam hal pengecekan kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait memerlukan penelitian lebih lanjut karena Nomor HS pada PIB tidak mutlak wajib ijin, maka Portal INSW akan memberikan respon *Analysing Point*, selanjutnya Petugas *Analysing Point* pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai akan melakukan pengecekan kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait
- f). Dalam hal pengecekan kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait tidak memerlukan penelitian lebih lanjut karena Nomor HS pada PIB mutlak wajib ijin, maka Portal INSW akan langsung melakukan pengecekan *by system*
- g). Jika proses pengecekan data PIB dengan Perijinan Terkait sesuai, maka Portal INSW akan meneruskan data PIB ke Sistem Komputer Kantor Bea dan Cukai terkait untuk diproses lebih lanjut (proses penjaluran)
- h). Jika tidak sesuai, maka Portal INSW akan memberikan respon penolakan secara elektronik melalui Modul EDI ImportirPPJK .

b. Mengurangi Penggunaan kertas dan biaya operasional

penggunaan kertas dalam birokrasi penyerahan PIB lebih berkurang . Sistem kerja dengan menggunakan sistem *Papperless* (penggunaan kertas berkurang), data-data dan dokumen kepabeanan hanya diproses dengan menggunakan media elektronik yaitu dengan memakai komputer, dan kemudian dengan sistem EDI

yang didukung dengan internet, data yang sudah diinput dikirimkan kepada pihak yang terkait dan pihak Bea dan Cukai, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk operasional juga berkurang.

Tabel 4.1 Perbandingan biaya operasional pengajuan PIB sistem EDI dan sistem manual

No	Biaya	Sistem EDI		Sistem Manual		Keterangan
	Operasional	Efektif	Efisien	Efektif	Efisien	
1	<i>under table</i>	√	√	-	-	Tercapai
2	Biaya Makan	√	√	√	-	Tercapai
3	Biaya lembur	√	√	-	-	Tercapai
4	Biaya BBM	√	√	-	-	Tercapai
5	Biaya Kirim	√	√	-	-	Tercapai
6	Biaya Listrik	√	√	-	√	Tercapai
7	Biaya Foto Copy	√	√	-	-	Tercapai
8	Biaya Internet	√	√	√	√	Tercapai
9	Biaya Telpon	√	√	√	√	Tercapai

c. Mempercepat pelayanan pemberitahuan dan pemrosesan barang

Dengan penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB ini, maka pemberitahuan respon status dokumen PIB dan dokumen kepabeanan lainnya semakin cepat dan pelayanan respon SPPB dari pihak KPBC semakin cepat dan pihak PPJK langsung dapat memproses untuk kegiatan selanjutnya yaitu pengiriman barang dan tentunya tidak terlalu memakan banyak waktu dan biaya yang digunakan untuk operasional pengurusan barang impor semakin sedikit.

Tabel 4.1 Perbandingan Indikator dari Sistem EDI dan Sistem Manual

No	Indikator	Sistem EDI	Sistem Manual	Efektif	Efisien
1	Kecepatan	4 Jam	5-7 hari	EDI	EDI
2	Keakuratan	memiliki ECC (Error Correction Control)	adanya entry data ulang	EDI	EDI
3	Keamanan	Tidak bisa dipalsukan	Dapat Dipalsukan	EDI	EDI

d. Mengurangi *human errors*

Penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB ke KPBC akan mengurangi adanya human errors. dikarenakan sudah ada sistem yang pasti dan ketentuan tentang setiap pelanggaran atau kesalahan yang kemudian mengharuskan pengguna sistem EDI untuk benar benar teliti dan sungguh-sungguh dalam pekerjaan dan pengoperasian pengisian data.

e. Menambah pengetahuan penggunaan jasa dan sistem komputerisasi

Dengan adanya penggunaan sistem ini diperusahaan, maka pengetahuan karyawan tentang penggunaan jasa dan komputerisasi menjadi semakin bertambah dan berkembang. Dikarenakan pertukaran data elektronik yang harus menggunakan komputer dan fasilitas internet untuk melakukan pelayanan, maka para karyawan tersebut mau tidak mau harus mengetahui

bagaimana cara mengoperasikam dan bagaimana cara kerja dengan menggunakan komputer dan internet terutama pada aplikasi EDI.

2. Kendala Yang Dialami PT. Heru Rahayu Surabaya Dalam Penggunaan Sistem *Electronic Data Interchange* (EDI) Pabean

Penerapan yang yang diwajibkan bagi semua pihak PPJK pada untuk merubah sistem penyerahan dokumen PIB dari cara manual ke sistem PDE dengan menggunakan sistem EDI, tidak hanya berdampak positif saja, karena beberapa ketentuan yang diatur, pihak KPBC menuntut adanya kesempurnaan dalam tatacara penyerahan dokumen dengan sistem tersebut. Kesalahan penggunaan sistem EDI dalam proses pengajuan PIB dalam perusahaan pasti akan terjadi, karena pengetahuan pengguna akan sistem EDI ini masih minim. Kendala-kendala dalam proses jalannya proses pemberitahuan dokumen pabean ini dapat menyebabkan pekerjaan perusahaan menjadi tidak efektif dan efisien. Dimana kendala- kendala tersebut dapat mengakibatkan proses penundaan pengurusan *customs clearance* dan *delivery cargo*.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi PT. Heru Rahayu Surabaya dalam penggunaan EDI Pabean untuk pengajuan pemberitahuan impor barang antara lain:

a. Kendala teknis

Kednala teknis yang dialami PT. Heru Rahayu Surabaya yaitu yang berhubungan dengan pentransferan data lewat komputer,

fasilitas internet, fasilitas telepon dan biaya untuk pengadaan perangkat komputer.

Dengan sistem PDE perusahaan harus memiliki komputer dan membeli lalu perangkat EDI guna memenuhi kebutuhan fasilitas untuk proses pengajuan PIB, yang dimana biaya tersebut juga harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pertama kali penginstalan program dan ketika meng-*upgrade* versi baru dari aplikasi EDI Pabean yang digunakan.

Penggunaan internet dalam proses pengajuan PIB dengan sistem EDI sangat diperlukan bagi PT. Heru Rahayu, akan tetapi ada beberapa waktu dimana koneksi internet didalam perusahaan tidak berjalan dengan lancar, sehingga beberapa kali terjadi keterlambatan dalam pengkomunikasian dokumen ke pihak Bea dan Cukai. Selain itu juga aliran arus listrik juga menjadi kendala saat terjadi pemadaman listrik, karena dengan sistem EDI yang harus menggunakan komputer jika listrik padam perusahaan harus menunggu sampai listrik kembali menyala.

b. Adanya penambahan dokumen untuk pengajuan PIB

Masih adanya persyaratan yang mengharuskan legalitas surat asli. Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih mengharuskan pengurusan surat keterangan asal (COO) dilampiri dokumen PEB yang telah mendapat legalitas dari Bea dan Cukai karena di Dinas Perindustrian dan perdagangan belum terpasang perangkat yang

bisa memantau secara *on-line* dan masih ada beberapa instansi terkait yang belum mampu menerapkan sistem *on-line* secara baik.

Dalam dokumen PIB harus disertakan nomor dan tanggal dokumen fasilitas jika pemilik barang menggunakan fasilitas untuk barang yang diimpornya, seperti, *Certificate Of Origin*, *Master List*, SNI, HS *code* dan lain-lain , PPJK harus mengetahui dimana gudang tempat barang impor tersebut di timbun dengan menunggu dokumen BC.1.1 (*Manifest*), dokumen karantina dan dokumen BPOM. Dalam hal ini mengharuskan perusahaan harus bekerjasama baik dengan pihak terkait. Jika dalam suatu dokumen PIB salah satu dokumen tersebut tidak diinput maka dokumen PIB akan kena *reject* dan proses pengajuan PIB dalam *customs clearance* akan terhambat.

c. Adanya karyawan yang belum bisa baik dalam mengoperasikan komputer dan sistem EDI

Sering ditemui kerusakan terhadap sistem dan jaringan akibat pemahaman yang kurang tentang komputer beserta komponen-komponennya. Pada saat pengoperasian komputer sering ditemukan karyawan membuka banyak aplikasi selain sistem EDI, sehingga menimbulkan kemacetan (*hang*) yang tidak dapat diatasi kecuali dengan memutus saluran tenaga listrik secara paksa. Akibat mematikan komputer yang tidak sesuai dengan prosedur seharusnya, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada

komponen-komponen *hard disk*, dan apabila hal tersebut sering terjadi maka tidak menutup kemungkinan seluruh data-data yang tersimpan akan tidak dapat terbaca lagi atau hilang dan akan sangat menghambat proses *customs clearance* melalui sistem EDI.

Seringnya terjadi kesalahan atau eror dalam proses penginputan data ke dalam sistem EDI oleh karyawan sehingga mengakibatkan dokumen PIB yang dikirimkan mendapatkan respon *reject* bukan *ready* seperti yang diharapkan. Kesalahan dalam pemasukan angka biasanya sangat fatal seperti saat memasukan data berupa bilangan , tanggal, jumlah barang, kode HS, dan lain sebagainya. Misalkan dalam suatu B/L adalah 10,000 Set, maka dalam memasukan data tersebut ke dalam kolom tidak perlu menggunakan tanda koma karena sistem akan secara otomatis menambahkan tanda koma pada bilangan tersebut. Apabila tetap ditulis dengan menggunakan koma maka sistem akan membaca data tersebut menjadi 10 Set bukan 10,000 Set, hal tersebut tentu saja akan menimbulkan permasalahan pada saat pemeriksaan oleh pihak bea dan cukai karena sesuai dengan pasal 8A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, dijelaskan tentang denda yang dikenakan apabila pemberitahuan jumlah barang kurang dari atau lebih dari kenyataan yang ada maka wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang atau lebih

dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00.

Berikut beberapa contoh lain **respon *reject* (penolakan)** dari PIB komunikasi:

1) Nomor pengajuan sudah dipakai

Respon *reject* ini terjadi karena pengguna jasa mengirimkan dokumen berulang kali. Terdapat dokumen yang terdahulu yang masih sedang dalam proses validasi namun dikirimkan dokumen baru, maka data yang terakhir dikirim akan mendapat respon *reject*.

2) Kode Pelabuhan tidak terdaftar

Respon *reject* terjadi karena terdapat kode pelabuhan yang tidak dikenal/tidak didalam dokumen. Pihak PPJK harus melakukan perbaikan data dan mengirimkan kembali dokumen pabean.

3) Host BL/AWB PIB tidak sesuai dgn data di BC.11

Terdapat perbedaan antara *house* B/L yang dicantumkan di dokumen PIB dengan data yang terdapat di manifest. Kesalahan terjadi pada penulisan Nomor BL / AWB atau tanggal BL / AWB atau nomor dan tanggal BL / AWB.

4) SKEP Tidak Dikirim Sudah Lewat Waktu Tunggu Penyerahan SKEP 3 hari

Proses dokumen melalui Analyzing Point (AP), maka dimungkinkan petugas AP untuk meminta dokumen pendukung dari pengguna jasa (pengajuan dokumen pendukung). Apabila dokumen pendukung tersebut tidak diserahkan terhitung 3 (tiga) hari dari dikeluarkannya permohonan untuk mengajukan dokumen pendukung maka dokumen akan otomatis di *reject*.

5) Seri HS barang terkena lartas Pelabuhan muat tidak sesuai

Terdapat perbedaan antara data yang dicantumkan di dokumen pabean dengan data yang dikirimkan oleh instansi penerbit perijinan. Perbedaan terdapat pada kode pelabuhan muat yang dicantumkan di dokumen PIB dengan kode pelabuhan muat yang dicantumkan di dalam dokumen perijinan. PPJK harus memastikan pengisian kode sudah sesuai dan kirimkan kembali dokumen PIB yang sudah diperbaiki.

6) Kode HS terkena lartas tidak sesuai dengan item perjanjian

Terdapat perbedaan antara data yang dicantumkan di dokumen pabean dengan dokumen yang dikirimkan oleh instansi penerbit perjanjian. Perbedaan terdapat kode HS yang dicantumkan di dokumen PIB dengan kode HS yang dicantumkan di dalam dokumen perjanjian. Solusinya adalah pihak PPJK harus memastikan pengisian kode sudah sesuai dan kirimkan kembali dokumen PIB yang sudah diperbaiki atau koordinasi dengan

instansi penerbit perjanjian untuk perbaikan data perijinan yang dikirim ke portal INSW.

7) Kesalahan kode HS

Respon reject terjadi karena terdapat kode HS yang tidak dikenal/tidak didalam dokumen. PPJK harus melakukan perbaikan data dan kirimkan kembali dokumen pabean.

8) *Credit Advice* (SSPCP) Tidak Ada, Sudah Lewat Waktu Tunggu (1 Hari)

Dokumen pabean yang dikirimkan tidak dapat direkonsiliasikan dengan dokumen pembayaran yang sesuai. Solusinya adalah apabila pembayaran sudah dilakukan cek apakah dokumen SSPCP sudah dikirimkan oleh bank. Apabila sudah dikirim, cek apakah nomor aju pada SSPCP sesuai dengan nomor aju dokumen PIB.

9) Blokir karena masih belum menyerahkan Berkas PIB terdahulu

Terdapat kewajiban penyerahan dokumen pabean yang belum diselesaikan. Solusi : serahkan dokumen pabean ke Bea dan Cukai selanjutnya lanjutkan proses dokumen baru seperti biasa.

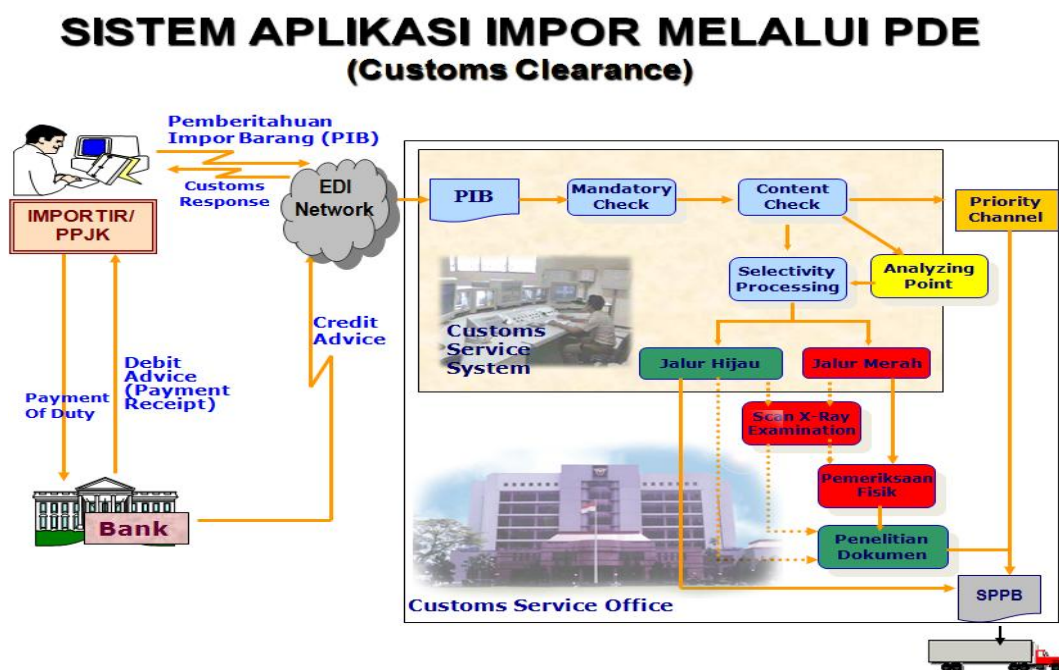
10) Salah Tarif

Terdapat kesalahan dalam pencantuman tarif Bea Masuk. Solusi : perbaiki tarif dan perhitungan nilai pajak dan bea masuknya, lalu dokumen dapat dikirimkan kembali

d. Kondisi birokrasi dalam pengurusan *customs clearance* melalui sistem *Electronic Data Interchange*

Berikut akan penulis jelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan tatalaksana impor dengan sistem PDE dan sistem manual:

1) Pelaksanaan impor dengan sistem PDE



Gambar 4.3 Tatalaksana Impor melalui sistem PDE

Sumber : modul pengisian PIB

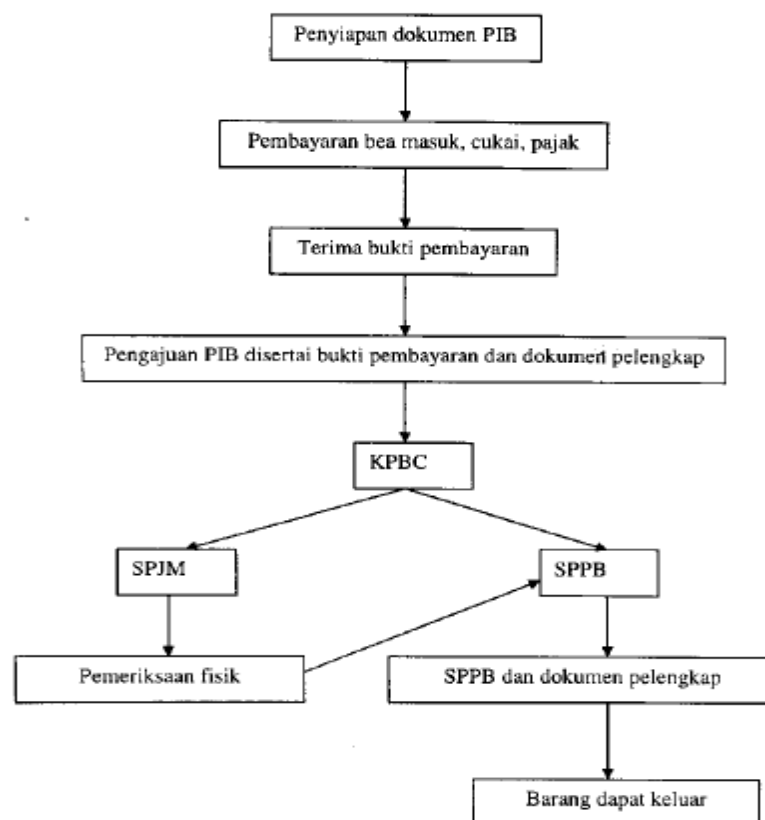
- a) Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimpor.

- b) Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimpor; kemudian antar Bank ke Bank Luar Negeri untuk menghubungi Supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati kedua belah pihak.
- c) Barang-barang dari Supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.
- d) Supplier mengirim faks ke Importer document B/L, Inv, Packing List dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Serifikat karantina, Form E, Form D, dsb)
- e) Original dokumen dikirim via Bank / original kedua ke importir
- f) Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang).
Jika importir mempunyai Modul PIB dan EDI System sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB nya.
- g) Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan di dalam PIB.
- h) Importir membayar ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBP

- i) Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
- j) Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
- k) Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perijinan (Analizing Point) terkait Lartas
- l) Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan ulang kembali data PIB
- m) Setelah proses di portal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai
- n) Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analizing Point di SKP
- o) Jika data benar akan dibuat penjaluran
- p) Jika PIB terkena jalur hijau maka akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)
- q) Jika PIB terkena jalur merah maka akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika

hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku.

- r) Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respon dan melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB
 - s) Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB
- 2) Pelaksanaan impor dengan sistem manual



Gambar 4.4 Tatalasana impor melalui sistem manual

- a) Importer/PPJK mentransfer data PIB dengan menggunakan disket serta mencetak lembar pengantar yang berisi data PIB yang telah ditransfer ke dalam disket.
- b) Importer/PPJK melakukan kewajibanya yaitu membayar bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor ke bank devisa persepsi atau kantor pabean tempat pengeluaran barang.
- c) Atas pembayaran tersebut importer/PPJK menerima bukti pembayaran.
- d) Untuk mendapat persetujuan dari pihak Bea dan Cukai, importer harus menyerahkan PIB beserta dokumen pelengkap.
- e) Menunggu sehari-hari untuk mendapatkan respond an pemeriksaan fisik barang
- f) Setelah pemerisaan fisik terbit respon SPPB
- g) Barang dapat dikeluarkan.

Dalam proses manual, dokumen harus diajukan secara fisik kepada administrasi pabean untuk dilakukan *re-entry* ke sistem computer Bea dan Cukai. Guna melakukan kegiatan tersebut diperlukan kehadiran yang bersangkutan ke KPBC untuk menyerahkan dokumen dan menunggu keputusan pihak Pabean. Dengan demikian selain memerlukan waktu yang cukup lama sekitar 5-7 hari kerja dan kebanyakan harus bolak-balik untuk menanyakan keputusan dari pihak pabean, juga dimungkinkan terjadinya *human errors* dalam proses *entry* secara manual tersebut.

Jika diperhatikan, sebenarnya alur teknis pelaksanaan menggunakan sistem EDI tidak berbeda dengan sistem manual. Hanya pada sistem EDI terjadi penyerdahan proses dimana penyampaian data tidak membutuhkan kehadiran pihak PPJK, cukup disampaikan melalui internet atau secara *online*. Sehingga secara teknis pelaksanaan penyerahan data secara *online* akan terjadi efisiensi waktu dan biaya operasional karena tidak diperlukan lagi kedatangan pihak PPJK ke KPBC dan dengan internet atau sistem *online* pihak PPJK menghemat penggunaan kertas dan hanya memerlukan kurang lebih 4 jam dalam proses *customs clearance*.

Dalam kenyataannya di lapangan, penggunaan sistem pelayanan pabean dengan menggunakan sistem EDI masih belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan sistem EDI dapat dilihat pada berbagai kejadian berikut ini :

1. Terjadinya Penumpukan Dokumen

Seharusnya dengan penerapan sistem EDI, jawaban atau respon atas pemasukan data secara *online* yang harus diberikan oleh petugas bea cukai pada saat itu juga terjadi keterlambatan dan pihak PPJK diminta lagi untuk menyerahkan dokumen fisik secara manual ke KPBC. Disamping itu petugas bea cukai ternyata tidak langsung menindak lanjuti atau memberi respon atas data yang dikirimkan oleh pihak PPJK melalui sistem EDI. Cara kerja pihak Bea dan Cukai masih sama seperti pada saat sistem manual, yaitu

menunggu pihak PPJK yang aktif untuk menanyakan proses pengajuan dokumen tersebut.

2. Efisiensi waktu yang seharusnya terjadi tidak tercapai

Akibat dari pihak PPJK yang masih tetap harus menyerahkan dokumen fisik ke KPBC secara manual, maka tatap muka tetap masih tetap terjadi dalam pengurusah dokumen tersebut. Pihak PPJK mengeluhkan penggunaan sistem EDI yang seharusnya cukup dengan sistem *online* saja tanpa harus melakukan penyerahan dokumen fisik ke pihak Bea dan Cukai yang seharusnya selesai tepat waktu akhirnya menjadi memakan waktu yang cukup lumayan dalam proses penyerahan dan pengurusan dokumen.

Melihat kenyataan tersebut dimana alur birokrasi yang harus dilalui masih panjang, sering ditemukan terjadinya kemacetan arus barang impor yang akan dikeluarkan dari pelabuhan, hal ini diakibatkan karena pengurusan dokumen PIB dan dokumen kepabeanan lainnya sehingga proses SPPB yang terhamambat oleh adanya faktor-faktor yang telah diuraikan diatas. Barang-barang impor tersebut akhirnya tidak dapat dikeluarkan dari tempat penumpukan atau gudang sampai dengan proses pengeluaran dokumen SPPB, mengakibatkan penambah biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh perusahaan atau forwarder terkait

dengan semakin lamanya waktu penumpukan tersebut di gudang atau lapangan penumpukan..

3. Upaya yang ditempuh PT. Heru Rahayu Surabaya untuk mengatasi kendala dalam penggunaan sistem *Electronic Data Interchange* untuk dapat menunjang efektifitas dan efisiensi kerja

Dalam tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal bagi perusahaan dan juga mencapai pengoptimalisasian waktu dan biaya dalam proses penyerahan data dan dokumen PIB pada saat melaksanakan kegiatan *customs clearance* PT. Heru Rahayu Surabaya mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Merekrut karyawan yang ahli di bidang kepabeanan dan berkompetensi di bidang komputerisasi

Menjadi perusahaan PPJK yang menggunakan sistem EDI dalam kegiatan kerja, PT. Heru Rahayu mempunyai tuntutan dari sistem dimana pada sistem ini harus memakai sebuah alat pembantu yaitu komputer yang diisi dengan sebuah aplikasi khusus yaitu EDI Pabean untuk pembuatan PIB, maka perusahaan mengatasi kendala tersebut dengan merekrut karyawan yang handal dan trampil dalam penggunaan komputerisasi dan merekrut karyawan yang ahli dalam bidang kepabeanan , karena seorang ahli tersebut sangat dibutuhkan ketika terjadi kendala-kendala seperti di atas.

- b. Memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada staf yang melakukan penyerahan data dan dokumen PIB

Sebelum karyawan menggunakan sistem EDI dalam pengoperasiannya untuk bekerja, lebih baik karyawan tersebut diberikan pelatihan-pelatihan atau diklat di KPBC tentang bagaimana penggunaan sistem EDI dalam proses penggunaannya, agar pada saat pengoperasian sistem EDI tersebut karyawan tidak mengalami kesulitan dan kesalahan pada saat penginputan data dan dokumen. Dan kemudian melakukan pengawasan dan pengecekan rutin terhadap kinerja staff yang mengoperasikan sistem EDI.

- c. Mengikuti segala macam perubahan sistem EDI yang di berlakukan oleh pemerintah, jika terjadi seperti peng-*upgrade*-an sistem EDI maka PT. Heru Rahayu Surabaya harus ikut *serta* meng-*update* sistem EDI pada komputernya.
- d. Melakukan service internet secara rutin agar koneksi internet di dalam perusahaan berjalan dengan lancar, jika perlu diadakan penambahan kuota internet.
- e. Perlunya diadakan penyederhanaan birokrasi dalam proses pengajuan PIB dari pihak KPBC sehingga waktu yang dibutuhkan dalam mengurus segala macam bentuk pengurusan dokumen yang berkaitan dengan kepabeaan dapat dipersingkat. Dan tidak terjadi keterlambatan respon dan penumpukan dokumen

- f. Membina hubungan yang baik dengan pihak pemilik barang ataupun pihak-pihak yang terkait seperti, perusahaan forwarding, perusahaan pelayaran, balai karantina, BPOM dan lain sebagainya. Karena dalam pengajuan dokumen impor membutuhkan dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak tersebut. Dan dengan membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak tersebut PT. Heru Rahayu akan semakin terbantu dan mudah dalam proses pengajuan PIB.
- g. Mengatasi masalah keterlambatan respon dengan cara datang langsung ke KPBC. Dengan kendala lambatnya respon maka PT. Heru Rahayu Surabaya mengambil cara dengan datang langsung ke KPBC dan memberitahukan kepada pejabat yang mengurus PIB bahwa pihak PT. Heru Rahayu Surabaya sudah mengirimkan pemberitahuan akan tetapi belum mendapatkan respon. Hal ini menuntut akan kecepatan dan ketepatan kerja yang harus didapatkan untuk menghindari denda *demurage* atau penambahan biaya penumpukan atas barang impor.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap penggunaan sistem *Electronic Data interchanng* (EDI) Pabean dalam proses pengajuan PIB terhadap efektifitas dan efisiensi kerja pada PT. Heru Rahayu Surabaya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem *Electronic Data interchanng* (EDI) Pabean dibutuhkan oleh perusahaan PT. Heru Rahayu Surabaya, untuk mempermudah penyerahan data dan dokumen pabean terutama dokumen PIB dalam kegiatan *customs clearance* kepada pihak Bea dan Cukai. selain itu juga menghemat penggunaan waktu, biaya operasional serta penggunaan kertas dalam perusahaan.
2. Adapun faktor penghambat atau kendala yang terdapat pada PT. Heru Rahayu Surabaya seperti terjadinya *human errors*, lambatnya respon, koneksi internet. Yang pada dasarnya disebabkan oleh kekurangan SDM yang berkompeten dalam pengoprasian penggunaan sistem EDI, maupun *trouble* dari pihak KPBC dan belum didukung oleh kesiapan pihak-pihak instansi terkait dalam sistem *on-line*.
3. Dengan adanya upaya yang ditempuh oleh PT. Heru Rahayu Surabaya dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penyerahan dokumen PIB dengan sistem EDI, maka dapat dilihat pekerjaan

penyerahan data dan dokumen PIB sudah lebih efektif dan efisien dan menuju kepada manfaat dari sistem EDI itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis berupaya memberikan saran yang dapat berguna PT. Heru Rahayu Surabaya dan bagi aparaturnya Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Perak sebagai birokrator dalam masalah kepabeanan, saran tersebut antara lain:

1. Diharapkan dengan adanya penggunaan sistem EDI dalam proses pengurusan dokumen pada PT. Heru Rahayu Surabaya bisa lebih meningkatkan kembali pelayanan dan dapat menyerahkan data dengan lebih cermat, teliti, dan tepat waktu. Untuk menghemat pengeluaran perusahaan, sebaiknya SDM yang sudah diberikan pelatihan penggunaan EDI diawasi secara berkala untuk mengurangi *human errors* atau kesalahan-kesalahan lainnya.
2. Diharapkan PT. Heru Rahayu dapat meng-*upgrade* fasilitas penunjang seperti komputer dan internet guna mendukung sistem EDI.
3. Diharapkan pihak DJBC memberikan fasilitas sejenis EDI kepada instansi terkait seperti karantina, BPOM dan yang lainnya, sehingga pekerjaan penyerahan data dan dokumen PIB melalui sistem EDI akan lebih efektif dan efisien, dan dapat mengurangi kelemahan dalam sistem yang digunakan oleh PT. Heru Rahayu Surabaya dan pengguna jasa lainnya pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrachman Eddy, 1995, *Penerapan EDI dalam Prosedur Kepabeanan*, Seminar Sehari Prosedur Impor & Ekspor Era Undang-Undang Kepabeanan.
- Ali Purwito dan Indriani, 2016, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan*. Mitra Wacana Media, Yogyakarta.
- Capt. R.P.Suyono, 2007, *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut*, Penerbit PPM, Jakarta.
- Engkos Kosasih, dan Hananto Soewed, 2007, *Manajemen Perusahaan Pelayaran*, STMT Trisakti, Jakarta.
- Felix Hadi Mulyanto dan Endar Sugiarto, 1997, *Pabean, Imigrasi dan Karantina*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H. Emerson dalam Soewarno Handayani, 1990, *Efektifitas Organisasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hariwijaya, M. dan Triton P.B., 2011, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*, Oryza, Yogyakarta.
- Herman Budi Sasono, 2012, *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- I Komang Oka Berata, 2014, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, Raih ASA, Jakarta.
- Modul Pelatihan Penggunaan Modul Perusahaan PIB (BC2.0) PEB (BC3.0), 2016, PT. EDI Indonesia.
- Moleong Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- R. Kelly Rainer, JR, 2009, *Manajemen Informasi Sistem*, Prima Publisng, Jakarta.
- Raja Oloan Said Gurning dan Eko Hariyadi Budianto, 2007, *Manajemen Bisnis Pelabuhan*, APE publisng, Jakarta.
- Sukardi, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutarto, 1978, *Efektifitas Kerja Definisi Faktor Yang Mempengaruhi dan Alat Ukur Efektifitas Kerja*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

INTERNET

<http://www.edi-indonesia.co.id/>

<http://www.beacukai.go.id/>

<http://www.insw.go.id/>

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA

A. DAFTAR RESPONDEN

1. Responden 1: (Bapak Heri Siswanto) Direktur PT. Heru Rahayu Surabaya
2. Responden 2: (Bapak Rasmino Moerdjandono) Ahli Kepabeanan
3. Responden 3: (Bapak Anugrah Dian) Kepala Operasional
4. Responden 4: (Bapak Berry Karundeng) Staff Operasional Dokumen

B. HASIL WAWANCARA

1. Wawancara Dengan Responden 1

Pertanyaan : selamat siang pak, bisa bapak ceritakan tentang bagaimana bapak bisa membangun usaha bisnis bapak hingga bisa jadi seperti sekarang ini?

Jawaban : dulu sebelum memulai usaha ini saya adalah salah satu karyawan di PT. Gesuri Loid lalu dengan pengalaman yang ada untuk pertama kali saya memulai dan membangun usaha ini pada tahun 1998 bergabung dengan pengusaha korea dengan membentuk perusahaan bongkar muat PT. Daisy Pemata Samudra. Nama saya mulai dikenal di pelabuhan lalu saya memberanikan diri dan optipis kemudian mendirikan perusahaan PPJK PT. Heru Rahayu lalu saya bertemu dengan banyak klien yang menggunakan jasa saya kemudian mendapatkan keuntungan saya membuat perusahaan lainnya yaitu perusahaan PBM lagi, survey

kapal dan trucking. Saya juga sempat membangun usaha konstruksi tetapi gagal karena kena tipu. Di luar usaha pelayaran saya juga mempunyai perusahaan travel.

Pertanyaan : kenapa bapak memutuskan untuk membangun banyak perusahaan tersebut dan kenapa bapak memilih bidang-bidang tersebut?

Jawaban : bidang usaha yang saya jalankan saat ini saling berkaitan, contohnya saja perusahaan pbm selalu berkaitan dengan PPJK trucking dan survey, awalnya sebelum saya mempunyai perusahaan-perusahaan tersebut saya masih menggunakan jasa orang lain lalu saya berpikir kenapa saya tidak membangun saja perusahaan tersebut sendiri sehingga saya lebih bisa mengembangkan usaha dan menguntungkan.

Pertanyaan : lalu bagaimana dengan PT. Heru Rahayu sebagai PPJK menurut bapak?

Jawaban : PT. Heru Rahayu ini adalah perusahaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang mempunyai usaha atau industry yang berpotensi bidang ekspor-impor untuk pengurusan kepabeanan mulai dari pendokumenan, *customs clearance*, pergudangan hingga *delivery*.

Pertanyaan : yang saya tahu di PT. Heru Rahayu ini dalam
pengurusan *customs clearance*, pengajuan PIB ke pihak
Bea Cukai menggunakan sebuah sistem yang
dinamakan EDI, lalu sejak kapan menggunakan sistem
tersebut dan bagaimana menurut bapak tentang
penggunaan sistem EDI tersebut?

Jawaban : memang sudah diharuskan dari pemerintah untuk
menggunakan sistem EDI untuk pengajuan PIB kira
kira tahun 2005, jadi saya hanya mengikuti kebijakan
dari pemerintah saja karena menurut saya itu sangat
memudahkan proses *customs clearance* walaupun
resikonya perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk
membeli komputer dan sistem EDI itu.

Pertanyaan : menurut bapak kendala apa yang sering muncul dalam
penggunaan sistem EDI ?

Jawaban : sistem EDI itu sendiri sebenarnya masih kurang efisien
karena terkadang respon dari bea cukai sendiri masih
lama, kita harus datang ke KPBC dulu agar dapat
respon, terus SDM yang ada disini masih belajar
menggunakan sistem EDI jadi ya masih sering terjadi
kesalahan pemasukan data atau dokumen ke sistem
tersebut, SDM disini kan cuman 1 yang ahli di bidang
kepabeanan , pak Rasmino, yang lain masih dalam

tahap penyesuaian, mungkin juga kalau listrik mati itu jadi kendala kita karena sistem itu kan menggunakan computer dan butuh listrik.

2. Wawancara Dengan Responden 2

Pertanyaan : Bapak Rasmino sebagai seorang ahli kepabeanan di perusahaan ini, saya ingin bertanya bagaimana menurut bapak tentang sistem edi di perusahaan ini?

Jawaban : selain karena kebijakan dari pemerintah penggunaan sistem EDI dalam perusahaan ini sangat membantu perusahaan dalam masalah pengerjaan pemberitahuan pabean, dulu sebelum menggunakan sistem online, kita harus pergi ke KPBC untuk menyerahkan dokumen pemberitahuan pabean waktunya bisa sampai paling sedikit 5-7 hari, sekarang hanya perlu sekitar 4 jam. Dan juga banyak manfaat dari penggunaan sistem EDI tersebut diantaranya mampu mengikuti perkembangan INSW, mengurangi penggunaan kertas dan biaya operasional, mempercepat pelayanan pemberitahuan dan pemrosesan barang, mengurangi *human errors*, meninggalkan sistem birokrasi yang rumit, menambah pengetahuan pengguna jasa dan sistem komputerisasi.

Pertanyaan : bisa bapak jelaskan apa itu INSW dan bagaimana kerja INSW tersebut?

Jawaban : INSW itu adalah sebuah portal dimana di dalam portal tersebut kita dapat mengetahui tentang ketentuan barang impor, kode HS dan tracking PIB. Cara kerja INSW itu adalah ada beberapa step:

- a). Sistem INSW menampung semua database perijinan berdasarkan peraturan dari instansi teknis (*GA-Goverment Agency*) meliputi larangan dan pembatasan di bidang impor.
- b). Instansi teknis terkait meng-upload perijinan yang diterbitkannya ke Portal INSW.
- c). Portal INSW akan melakukan pengecekan kesesuaian data PIB yang dikirim oleh Importir/PPJK secara elektronik dengan database lartas impor berdasarkan parameter Nomor HS
- d). Dalam hal Nomor HS membutuhkan perijinan, maka Sistem INSW akan mengecek kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait berdasarkan parameter Nomor Aju PIB, NPWP, nomor dan tanggal perijinan, kode ijin dan masa berlaku
- e). Dalam hal pengecekan kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait memerlukan penelitian lebih lanjut karena Nomor HS pada PIB tidak mutlak wajib ijin,

maka Portal INSW akan memberikan respon Analysing Point, selanjutnya Petugas Analysing Point pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai akan melakukan pengecekan kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait

f). Dalam hal pengecekan kesesuaian data PIB dengan Perijinan Terkait tidak memerlukan penelitian lebih lanjut karena Nomor HS pada PIB mutlak wajib ijin, maka Portal INSW akan langsung melakukan pengecekan *by system*

g). Jika proses pengecekan data PIB dengan Perijinan Terkait sesuai, maka Portal INSW akan meneruskan data PIB ke Sistem Komputer Kantor Bea dan Cukai terkait untuk diproses lebih lanjut (proses penjaluran)

h). Jika tidak sesuai, maka Portal INSW akan memberikan respon penolakan secara elektronik melalui Modul EDI Importir PPJK .

Pertanyaan : Kendala apa yang sering muncul dalam proses penggunaan sistem EDI ini pak?

Jawaban : kendala yang sering terjadi itu kesalahan pemasukan data ke dalam sistem oleh karyawan yang mengoperasikan sistem tersebut, dan kelalaian

karyawan oprasional dalam penyerahan dokumen ke beacukai, SDM di kantor ini masih harus banyak di asah agar kesalahan-kesalahan seperti itu tidak terjadi.

3. Wawancara Dengan Responden 3

Pertanyaan : menurut bapak Dian sebagai kepala opsional , bagaimana penggunaan sistem EDI apakah dapat menimbulkan efektifitas dan efisiensi?

Jawaban : iya, dengan adanya penggunaan sistem tersebut di perusahaan efisien dan efisiensi kerja dapat tercapai tetapi terkadang sistem itu masih belum berjalan dengan lancer, masih sering terjaditroubel dari pihak bea cukai dan mengharuskan kami ke KPBC.

Pertanyaan : kendala apa yang sering terjadi dalam penggunaan sistem EDI ?

Jawaban : kalau kendala dalam operasional adalah waktu koordinasi dalam bekerja saja, karyawan disini masih sering miskomunikasi dalam proses pengajuan atau dalam proses delivery barang, terus kalau penggunaan EDI sendiri disini cuman baru pak Berry yang bisa dengan baik, jadi jika pak berry tidak ada atau di operasikan oleh karyawan lain sering terjadi kesalahan dan akhirnya kita kena reject dokumen.

Pertanyaan : upaya apa saja yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi masalah yang terjadi?

Jawaban : sejauh ini perusahaan mengatasi masalah yang timbul dengan merekrut karyawan yang berkompeten di bidang pabean, datang ke KPBC untuk mengurus reject, menjalin kerjasama komunikasi yang baik dengan pihak bea cukai dan pihak pemilik barang atau forwarding.

4. Wawancara Dengan Responden 3

Pertanyaa : bagaimana menurut bapak Berry tentang sistem kepabeanan yang digunakan saat ini?

Jawaban : menurut saya sistem edi memang memberikan banyak manfaat untuk perusahaan tetapi sistem EDI yang sekarang ini belum optimal, karena terkadang masih terjadi keterlambatan respon dari pihak bea cukai dan juga masih ada instansi terkait belum menggunakan sistem EDI seperti karantina dan BPOM dan juga dari pihak bank yang terkadang juga kurang teliti.

Pertanyaan : kendala apa saja yang bapak alami saat mengoperasikan sistem EDI?

Jawaban : kalau ditanya soal kendala kendalanya ada beberapa, kendala teknis, kendala dari SDM contohnya seperti kurangnya pemahaman staff kami yang terkadang

kurang teliti dalam pengisian PIB sehingga menimbulkan kendala teknisnya karena ini menggunakan computer adalah saat terjadi pemadaman kita tidak bisa bekerja, internet yang lemot, dan fasilitas yang lain yang kadang tidak berjalan semestinya.

Pertanyaan : bisa bapak jelaskan dokumen pabean seperti apa yang bisa sampai terjadi reject dokumen?

Jawaban : bisanya terjadi dokumen reject karena dari pihak PPJK itu sendiri dari pelayaran, BPOM, Karantina dan surveyor.

Contohnya :

- Dari pihak PPJK melakukan kesalahan dalam penginputan data kepabeanan seperti B/L, No. Container, Port Loading, tariff nilai pabean (Tarif /HS), Fasilitas, dokumen lartas [barang yang mau dating diurus regulasinya(SNI,Pertek), dan syarat kelengkapan impor]
- Dari pihak Pelayaran melakukan salah penginputan data manifest (BC 1.1)
- BPOM data pemeriksaan belum diupload
- Karantina data hasil pemeriksaan belum diupload

- Surveyor data pemeriksaan atau rekom
belum diupload.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : ATIKA KHOIRUL UMAROH
2. Tempat dan Tanggal Lahir : BANTUL, 19 AGUSTUS 1995
3. NIT : 50135048 K
4. Agama : ISLAM
5. Alamat Asal : NGLAREN RT03 POTORONO
BANGUNTAPAN BANTUL
6. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : SUROTO
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : BURUH
 - b. Ibu : WARYANTI
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA
7. Pendidikan Formal
 - a. Sekolah Dasar : SDN NGLAREN (2001-2007)
 - b. SLTP : SMPN 3 BANGUNTAPAN (2007-2010)
 - c. SMU : SMAN 1 SEWON (2010-2013)
 - d. Perguruan Tinggi : PIP SEMARANG (2013-2017)
8. Pengalaman Praktek Darat
 - a. PT. DANIEL SAMUDRA ABADI GRUP
27 JULI 2015 – 27 OKTOBER 2015
 - b. PT. SARANA PANDAWA LOGISTIK
2 NOVEMBER - 3 JUNI 2016
9. Organisasi yang Pernah di Ikuti
 - a. Humas 1 Dewan Galang Pramuka SMP N 3 Banguntapan
 - b. Bendahara Palang Merah Remaja SMP N 3 Banguntapan
 - c. Anggota PMI SMA N 1 Sewon
 - d. Staff Resimen dan Demustar 84 PIP Semarang